

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN  
INDONESIA-KOREA SELATAN 2013-2017**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**I WAYAN SULPAI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA-KOREA SELATAN 2013-2017

Oleh

I WAYAN SULPAI

Industri Pertahanan merupakan salah satu elemen penting dalam menyusun kekuatan pertahanan suatu negara. Indonesia sebagai negara *second-tier* belum mampu membangun dan memproduksi kebutuhan persenjataannya secara mandiri. Skripsi ini fokus pada kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama ini menarik, mengingat Korea Selatan bukanlah negara *first-tier* atau negara inovator dalam industri pertahanan global. Namun, pelaksanaan kerjasama dengan Korea Selatan mengalami penundaan pada tahun 2013. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan pada periode 2013-2017.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang erat dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara, serta teknik analisis triangulasi. Penelitian ini menggunakan Konsep Implementasi, Kerjasama Industri Pertahanan, Pengembangan Industri Pertahanan, Difusi Teknologi dan *Ladder of Production*.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwasanya kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan berjalan tidak sesuai dengan tahapan kerjasama. Hal ini diakibatkan adanya kelemahan pada poin perjanjian kerjasama, pergantian rezim yang terjadi di Korea Selatan dan keterlambatan penyiapan lini produksi. Selain itu, terjadi difusi teknologi melalui media *acquisition, transfer, co-production, development* dan *intellectual-exchange*. Kerjasama ini juga menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan model pengembangan *niche*.

Kata Kunci:

Implementasi, Kerjasama, Indonesia, Korea Selatan dan Industri Pertahanan.

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF DEFENCE INDUSTRIAL COOPERATION INDONESIA-SOUTH KOREA 2013-2017**

**By**

**I WAYAN SULPAI**

Defence industry is the one of the most important aspects to help state to increase its power. As a second-tier, Indonesia's defence industries have not been able to build and produce their military capability independently. The thesis is focus on cooperation between Indonesia and South Korea. This cooperation is unique, because South Korea is not the first-tier or the innovator in the global defence industries. But, the implementation was delayed on 2013. Therefore, the research aims to find out and analyze the implementation of defence industrial cooperation Indonesia and South Korea in period 2013-2017.

This research uses a descriptive type of research that closely related to a qualitative approach with the data collection techniques library studies, documentation and interview, as well as triangulation analysis techniques. This research uses the Concept of Implementation, Defence Industrial Cooperation, Defence Industry Development, Technology Diffusion and Ladder of Production.

The findings of this research concludes that the defence industrial cooperation Indonesia and South Korea is not running based on the masterplan, yet due to there was a weak point on the agreement / MoU, regime change in South Korea and lated on preparing boat line production. In addition, occoured technology diffusion in through acquisition, transfer, co-production, development and intellectual-exchange. This cooperation shows that Indonesia is using niche-production model on developing its national defence industries.

**Keyword:**

Implementation, Cooperation, Indonesia, South Korea and Defence Industry.

**IMPLEMENTASI KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN  
INDONESIA-KOREA SELATAN 2013-2017**

**Oleh**

**I WAYAN SULPAI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

**Judul Skripsi** : **IMPLEMENTASI KERJASAMA  
INDUSTRI PERTAHANAN  
INDONESIA-KOREA SELATAN  
2013-2017**

**Nama Mahasiswa** : **I Wayan Sulpai**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **1316071022**

**Program Studi** : **Hubungan Internasional**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**1. Komisi Pembimbing**

**Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**  
**NIP. 19580109 198603 1 002**

**Gita Karisma, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 19870128 201404 2 001**

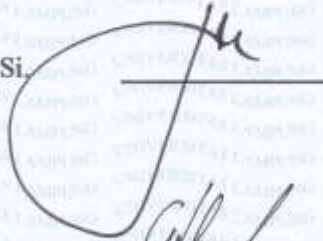
**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
**NIP. 19600416 198603 2 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua** : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.



**Sekretaris** : Gita Karisma, S.IP., M.Si.



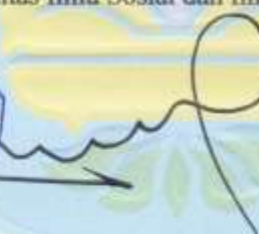
**Penguji** : Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si.



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Maret 2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

**PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 Maret 2019  
Yang membuat pernyataan,



I Wayan Sulpai  
NPM 1316071022

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bungamayang, Lampung Utara, pada 28 Oktober 1995 sebagai anak pertama dari pasangan bahagia Bapak I Nengah Kajeng dan Ibu Dra. Ngatmah.

Penulis menempuh pendidikan di TK Yayasan Pendidikan Pabrik Gula Bungamayang (YP PG Bungamayang) pada tahun 2000-2001, dilanjutkan ke SD YP PG Bungamayang pada tahun 2001-2007, dilanjutkan ke SMP YP PG Bungamayang pada tahun 2007-2010, dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2010-2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2013.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik seperti Pertemuan Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (FKMHII) serta Indonesia-French Defence Dialogue (IFDD) ke-5 dan Security Arrangement (SA-84) Indonesia-Malaysia bersama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.



## **MOTTO**

Tidak ada cinta yang tidak diungkapkan, kecuali oleh orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri.  
(5cm, 2012)

Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.  
(Q.S. An-Nisa: 86)

It is absolutely awesome to do something before someone else does, even though it is a weird thing.  
(I Wayan Sulpai, 2019)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur  
kupersembahkan karya sederhana ini untuk

Bapak (alm) I Nengah Kajeng, Ibu Dra. Ngatmah dan Pakde Suhirman,  
Yang selalu mendukung dan banyak berkorban dalam segala hal,

Adikku (alm) Made Mahardika Sari dan I Nyoman Supasa Amanda

serta Almamater tercinta Universitas Lampung,  
tempat dan media mengenal dunia

## SANWACANA

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan 2013-2017" ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat bijaksana dan selalu memberikan keceriaan kepada penulis.
4. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis.

5. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembahas / Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna bagi skripsi ini.
6. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik yang sangat pengertian dan membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh jajaran Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Pak Aman, Kang Gara, Bang Hasbi, Uda Tyo, Mas Indra, Pak Nizar, Mba Tiwi, Mba Atta, Mba Febri, Mba Pipit, Mba Gita Dj, Mba Tety, Mas Fredrik, Mba Nisa, Mba Ayu. Terimakasih atas ilmu, bantuan dan keceriaan baik di dalam maupun luar perkuliahan.
8. Mas Kol. Cku. Kuswanto yang telah memberikan kesempatan dan membantu selama masa persiapan skripsi.
9. Mayjend. TNI. Rizerius Hadisancoko, Letkol. Inf. Adam Mardamsyah, Kapt. Caj. Abdul Rahman, Pns. Taufik, Pns. Radit, Pns. Erna, Pns. Emi dan seluruh jajaran Direktorat Kerjasama Internasional yang telah memberikan kesempatan penulis untuk merasakan pengalaman yang luar biasa.
10. Kasubbag TU Dittekindhan Kemhan Letkol. Wira dan Letkol. Tek. Nanang F. Alamie yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Senior Brader & Sister Albertus Banu, Chandra Anwar, M. Reza Pahlevi, M. Ridho Dinata, Citra Amalia, Deya Mahardika, Dyah Arum, Putri Indraloka.
12. Brader Geraldo Marcellino & Fitrah Jaya yang selalu menjadi andalan penulis dalam menjalani proses ini, memberikan hiburan dan menjadi tempat penulis berbagi keluh kesah. Semoga skripsi ini menjadi salah satu hal yang membanggakan kalian.
13. Vascodamala, Antonius Yudi, Ria Aulia, Fitri Fatharani, Nova B.D., Wilma Dewasuti, Trialen L.G., Hardiansyah, Yasmin, Gustian, Anin, Firly, Ridho Rakhman, Wahid, Pio, Malebi, dll.
14. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

15. Rekan-rekan FKMHII yang menginspirasi dan banyak memberikan pengalaman.
16. Seluruh pihak yang memberikan doa, dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh penulis.

Bandar Lampung, 9 Maret 2019

Penulis,

I Wayan Sulpai

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	9
1.3.Tujuan Penelitian .....	9
1.4.Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1.Penelitian Terdahulu .....	11
2.2.Kerangka Konseptual .....	19
2.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	19
2.2.2. Konsep <i>Defence Industrial Cooperation</i> .....	22
2.2.3. Konsep Pengembangan Industri Pertahanan .....	23
2.2.4. Teori Difusi Teknologi.....	26
2.2.5. Konsep <i>Stratification and Tiers</i> .....	28
2.3.Kerangka Pikir .....	30
<b>III.METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1.Jenis Penelitian .....	32
3.2.Fokus Penelitian .....	32
3.3.Jenis dan Sumber Data .....	33
3.4.Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.5.Teknik Analisis Data .....	35
<b>IV. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>37</b>
4.1. Perkembangan Industri Pertahanan Dunia .....	38
4.1.1. Industri Pertahanan Indonesia.....	50

4.1.2. Industri Pertahanan Korea Selatan .....	63
4.2. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan .....	70
a. Orde Lama.....	71
b. Orde Baru .....	72
c. Era Reformasi.....	76
<b>V. HASIL &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>84</b>
5.1. Perjanjian Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan .	86
5.1.1. Perjanjian Kerjasama Pesawat Tempur.....	86
5.1.2. Perjanjian Kerjasama Kapal Selam.....	92
5.2. Implementasi Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan	
2013-2017 .....	99
5.2.1. Implementasi Kerjasama Pesawat Tempur .....	99
5.2.2. Implementasi Kerjasama Kapal Selam .....	107
5.2.3. Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea	
Selatan 2013-2017.....	112
5.2.4. Difusi Teknologi & <i>Ladder of Production</i> .....	116
<b>VI. PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
6.1. Kesimpulan .....	124
6.2. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1.	Perbandingan Alutsista Negara-negara Asia Tenggara (Matra Darat) ... 4
1.2.	Perbandingan Alutsista Negara-negara Asia Tenggara (Matra Laut) ..... 4
1.3.	Perbandingan Alutsista Negara-negara Asia Tenggara (Matra Udara)... 5
1.4.	Daftar Negara Mitra Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia ..... 6
4.1.	25 Negara Eksportir Persenjataan Global dan Kliennya..... 44
4.2.	Kewajiban Negara Anggota PBB dalam Rejim Transfer Senjata Internasional ..... 48
4.3.	Alutsista Indonesia ..... 62
4.4.	Produk Industri Pertahanan Korea Selatan ..... 69
4.5.	Nilai Investasi Korea Selatan ke Indonesia 2008-2015 ..... 78
4.6.	Kunjungan Pejabat Tinggi Indonesia-Korea Selatan 2000-2017..... 80
5.1.	Spesifikasi Kapal Selam Changbogo ..... 94
5.2.	Spesifikasi KAI KF-X / IF-X..... 100
5.3.	Implementasi Kerjasama Pesawat Tempur ..... 107
5.4.	Implementasi Kerjasama Kapal Selam ..... 111



## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1. <i>Ladder of Production</i> .....	29
5.1. Masterplam Program KF-X / IF-X.....	90
5.2. Tahapan Kerjasama Kapal Selam .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pikir .....	31
4.1. Napoleon's Artillery .....	40
4.2. Struktur Komite Kebijakan Industri Pertahanan .....	59
4.3. Tiga Pilar Industri Pertahanan Indonesia .....	60
5.1. Proses Kerjasama KAI KF-X / IF-X.....	88
5.2. Bagian Kapal Selam.....	97

## DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Agency for Defence Development
Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
BPIS	: Badan Pengelola Industri Strategis
BPPI	: Buku Putih Pertahanan Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
C4I	: <i>Command, Control, Communications, Computers and Intelligence</i>
CBMs	: <i>Confidence Building Measures</i>
CW	: Constructie Winkel
Dephan	: Departemen Pertahanan
DPA	: Defence Procurement Agency
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSME	: Daewoo Shipbuilding Marine Engineering
EMD Phase	: Engineering and Manufacturing Development Phase
GRIT	: <i>Graduated Reciprocation in Tension-Reduction</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPTN	: Industri Pesawat Terbang Nasional
ISR	: <i>Intelligence, Surveillance Reconnaissance</i>
Kemhan	: Kementerian Pertahanan
Keppres	: Keputusan Presiden
KF-X/ IF-X	: Korean Fighter-Xperiment/ Indonesian Fighter-Xperiment
KKIP	: Komite Kebijakan Industri Pertahanan
KKIP	: Komite Kebijakan Industri Pertahanan
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KOICA	: Korea International International Cooperation Agency
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
OJT	: On the Job Training
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PM Phase	: Production and Marketing Phase
RMA	: <i>Revolution in Military Affairs</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sesko	: Sekolah Staf dan Komando
SIPRI	: Stockholm International Peace Research Institute
TAF	: Turkish Armed Forces
TD Phase	: Technology Development Phase

TNI AD : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat  
TNI AL : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut  
TNI AU : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara  
ToT : *Transfer of Technology*  
TPIH : Tim Pengembangan Industri Pertahanan-Keamanan  
UAV : *Unmanned Aerial Vehicle*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertahanan merupakan sesuatu yang fundamental bagi keberlangsungan sebuah negara. Tanpa adanya sistem pertahanan yang kuat, ancaman dari pihak luar akan lebih mudah mengganggu stabilitas negara. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai unsur untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat. Salah satunya ialah memiliki industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata. Industri pertahanan ialah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Dalam konteks hubungan internasional, industri pertahanan memiliki pengaruh dalam dinamika yang terjadi pada sistem internasional. Pengembangan industri pertahanan suatu negara bisa diartikan sebagai upaya negara untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Hal ini tentunya berpotensi mempengaruhi kondisi politik regional, karena pengembangan

industri pertahanan, baik guna menopang kebutuhan angkatan bersenjata maupun berorientasi pada sektor ekonomi, akan menjadi perhatian bagi negara lain. Keberadaan industri pertahanan pada suatu negara menjadi nilai tawar bagi negara lain dalam menyikapi isu dan perundingan internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara baik berbatasan darat maupun laut.<sup>1</sup> Kondisi tersebut selain memiliki kelebihan, tentu juga diiringi resiko ancaman bagi stabilitas nasional, baik berupa ketegangan dengan negara tetangga seperti yang pernah dialami dengan Malaysia, hingga ancaman masuknya terorisme serta perdagangan & penyelundupan narkoba maupun produk ilegal lainnya. Hal ini patut menjadi perhatian, sehingga sudah menjadi keharusan bagi Indonesia untuk menjadikan pengembangan industri pertahanan nasional sebagai salah satu program yang diprioritaskan. Dengan bentang alam seluas 1.904.569 sq km, Indonesia memerlukan alat utama sistem senjata (alutsista) yang mampu menjangkau seluruh bagian negara. Sehingga dalam hal ini industri pertahanan memainkan peran yang krusial dalam sistem pertahanan negara. Terlebih apabila melihat perkembangan industri pertahanan nasional Indonesia selama ini, menjadikan industri pertahanan sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan.

---

<sup>1</sup> 10 negara yang berbatasan dengan Indonesia yaitu Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Filipina, Kepulauan Palau, Australia, India dan Vietnam

Menilik pada sejarah kebutuhan alutsista, Indonesia masih bergantung dengan negara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Akan tetapi, ketergantungan ini memberikan dampak yang tidak baik disaat negara mitra menghentikan pasokannya atau memberlakukan embargo pada Indonesia, seperti yang pernah dilakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan mitra strategis Indonesia pada era order baru ([www.sipri.org](http://www.sipri.org)). Embargo tersebut tentunya menghambat peningkatan kapabilitas militer Indonesia, terutama pada matra udara yang saat itu sangat bergantung pada pasokan alutsista dan komponen pendukung dari Amerika Serikat ([www.armscontrol.org](http://www.armscontrol.org)).

Pengalaman yang tidak mengenakan ini tentunya memacu Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional guna mencapai kemandirian di bidang industri pertahanan. Selain itu, data menunjukkan bahwa alutsista yang dimiliki Indonesia juga belum mampu berjalan selaras dengan predikat Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan kepemilikan alutsita negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 1.1. Perbandingan Alutsista  
Negara-negara Asia Tenggara 2017 (Matra Darat)**

	<b>Land Power</b>			
	Armored Fighting Vehicles	Towed Artillery	Rocket Projectors	Tank Strength
<b>Vietnam</b>	3150	2200	1100	1545
<b>Thailand</b>	2614	695	13	737
<b>Singapore</b>	2192	262	18	196
<b>Myanmar</b>	1358	884	108	592
<b>Malaysia</b>	1318	184	54	74
<b>Indonesia</b>	1089	80	86	418
<b>Cambodia</b>	300	600	0	550
<b>Philippines</b>	778	270	0	45
<b>Laos</b>	185	149	0	55

*Sumber: Diolah penulis (Globalfirepower.com)*

Indonesia memiliki PT. Pindad (Persero) sebagai ujung tombak dalam pengembangan dan produksi alutsista di matra darat serta *small weapons*. Namun, terlihat bahwa industri pertahanan nasional belum mampu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan alutsista darat yang paling unggul di kawasan Asia Tenggara. Kondisi serupa pun terjadi pada alutsista matra laut yang dimiliki Indonesia.

**Tabel 1.2. Perbandingan Alutsista  
Negara-negara Asia Tenggara 2017 (Matra Laut)**

	<b>Naval Power</b>			
	Submarines	Corvettes	Patrol Craft	Frigates
<b>Vietnam</b>	6	13	25	7
<b>Singapore</b>	6	6	11	6
<b>Indonesia</b>	4	24	74	7
<b>Malaysia</b>	2	6	41	2
<b>Philippines</b>	0	10	36	4
<b>Thailand</b>	0	7	32	8
<b>Laos</b>	0	0	61	0
<b>Myanmar</b>	0	3	40	5
<b>Cambodia</b>	0	0	26	0

*Sumber: Diolah penulis (Globalfirepower.com)*



Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam, lebih sedikit dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dengan 6 kapal selam, pun Vietnam dengan jumlah yang sama. Jumlah yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan hasil kerjasama dengan pihak luar dengan sistem pembelian, bahkan hanya 1 kapal selam yang merupakan produk di atas tahun 2000. Padahal, kapal selam merupakan salah satu alutsista yang memberikan efek *deterrence* yang besar bagi pihak yang berupaya mengganggu kedaulatan Indonesia.

**Tabel 1.3. Perbandingan Alutsista  
Negara-negara Asia Tenggara 2017 (Matra Udara)**

	<b>Air Power</b>			
	Fighter/ Interceptors	Attack Aircraft	Attack Helicopters	Helicopters
<b>Singapore</b>	92	119	17	76
<b>Thailand</b>	76	95	7	294
<b>Vietnam</b>	76	73	25	137
<b>Myanmar</b>	56	77	9	86
<b>Indonesia</b>	39	58	5	147
<b>Malaysia</b>	36	55	0	88
<b>Philippines</b>	0	8	0	98
<b>Laos</b>	0	0	0	22
<b>Cambodia</b>	0	0	0	17

*Sumber: Diolah penulis (Globalfirepower.com)*

Di matra udara, Indonesia memiliki PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) sebagai ujung tombak pengembangan dalam bidang avionik. Namun, alutsista yang dimiliki Indonesia masih tertinggal dari Thailand, Singapore, Vietnam bahkan oleh Myanmar. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial, terlebih ketertinggalan tersebut terletak pada alutsista jenis tempur, bukan jenis transportasi. Keadaan ini tentu menjadi hambatan bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara secara efektif dan efisien.

Kondisi yang tergambar di atas seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat pengembangan industri pertahanan nasional ke arah kemandirian. Namun, patut disadari bahwa memang masih terdapat banyak keterbatasan yang hingga saat ini belum mampu dirobahkan Indonesia untuk mewujudkan industri pertahanan nasional yang mandiri, terutama keterbatasan pada tingkat penguasaan teknologi. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Indonesia menjalin kerjasama di bidang industri pertahanan dengan negara lain yang dapat diwujudkan dalam bentuk *bilateral and multilateral cooperation*. Berikut ini merupakan negara-negara yang menjalin kerjasama industri pertahanan dengan Indonesia.

**Tabel 1.4. Daftar Negara mitra Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia.**

NO.	NEGARA	TAHUN (PERSETUJUAN, NOTA KESEPAHAMAN DLL)
1	Amerika Serikat	2015
2	Rusia	2006
3	Britania Raya	2012
4	Perancis	2012
5	Italia	1997
6	China	2007
7	India	2001
8	Polandia	2006
9	Korea Selatan	2009
10	Turki	2010
11	Jepang	2015
12	Afrika Selatan	2008
13	Vietnam	2010
14	Filipina	1997
15	Peru	2017
16	Brunei Darussalam	2003
17	Guinea Bissau	2017

*Sumber: Diolah oleh Penulis, 2017 (Kemlu RI, <http://treaty.kemlu.go.id>).*

Dalam ruang lingkup industri pertahanan global, Bitzinger mengelompokkan negara-negara di dunia ke dalam 3 strata / tingkatan, yaitu *first-tier*, *second-tier* dan *third-tier*. *First-tier* merupakan golongan tertinggi dalam tingkatan produsen persenjataan dengan tingkat penguasaan teknologi yang tinggi, seperti Amerika Serikat dan Rusia. *Second-tier* merupakan negara yang memiliki industri pertahanan berbasis luas, namun masih mengalami kendala / kekurangan dalam penelitian dan pengembangan secara mandiri, serta memiliki kekurangan kapasitas dalam memproduksi persenjataan yang kompleks. Negara yang tergolong *second-tier* juga merupakan aktor yang memainkan sebagian peran *first-tier* dan sebagian peran *third-tier* yang merupakan negara yang memiliki keterbatasan pendanaan, tingkat penguasaan teknologi yang rendah dalam kapabilitas produksi seperti Guinea Bissau (Bitzinger, 2003:7).

Sudah menjadi hal yang wajar apabila Indonesia menjalin kerjasama dengan negara *first-tier*. Namun, menariknya dewasa ini Indonesia telah menginisiasi kerjasama dengan negara yang tergolong *second-tier*. Hingga tahun 2017, Indonesia tercatat tengah aktif menjalin kerjasama industri pertahanan dengan 2 negara *second-tier* yaitu Korea Selatan dan Turki. Kerjasama dengan kedua negara tersebut terfokus pada sektor alutsista strategis yang menjadi prioritas Indonesia, yaitu kerjasama pengembangan *medium tank* / tank kelas sedang bersama Turki, dan kerjasama pengembangan pesawat tempur dan pengadaan kapal selam bersama Korea Selatan. Namun, dalam perjalanan kerjasama dengan 2 negara *second-tier*

tersebut terdapat perbedaan yaitu kerjasama dengan Turki berjalan lancar dan sudah menghasilkan produk *medium tank* di tahun 2017 ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Di lain sisi, kerjasama dengan Korea Selatan malah mengalami penundaan pada tahun 2013. Hal ini juga menunjukkan bahwa peningkatan kerjasama yang dijalin Indonesia dan Korea Selatan cukup lambat bila dibandingkan kerjasama yang dijalin Indonesia dan Turki. Situasi yang dialami dalam pelaksanaan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan patut menjadi perhatian dan menarik untuk diteliti. Untuk membatasi cakupan penelitian, maka penelitian ini mengkhususkan kerjasama industri pertahanan Indonesia-Korea Selatan dari tahun 2013 hingga 2017. Kurun waktu tersebut bertepatan dengan adanya penundaan kerjasama dengan Korea Selatan (2013) hingga tahun terbaru dicetuskannya penelitian ini (2017).

## 1.2. Rumusan Masalah

Industri pertahanan memainkan peran krusial dalam membentuk sistem pertahanan suatu negara. Oleh sebab itu, kapabilitas industri pertahanan saat ini seyogyanya menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan pada sebuah negara untuk mencapai standar fungsi penangkalan agar tercapai *Minimum Essential Force* (MEF). Terlebih dengan bentang wilayah yang luas, kemampuan industri pertahanan harus mampu menjawab berbagai kemungkinan tantangan, ancaman dan permasalahan lainnya. Dinamika yang terjadi pada pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan di bidang industri pertahanan tentunya patut menjadi perhatian. Berdasarkan penjabaran tersebut diambil pertanyaan penelitian yaitu, *Bagaimana implementasi kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan pada periode 2013-2017?*

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjadi arahan analisa lebih lanjut guna menjawab pertanyaan penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kerjasama industri pertahanan yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan pada 2013-2017.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat ditariknya suatu kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang dapat bermanfaat untuk:

1. **Manfaat Keilmuan:** Penelitian diharapkan bermanfaat untuk memperkuat teori-teori dalam hubungan internasional serta memperkaya wawasan akademisi hubungan internasional pada kajian kerjasama internasional, khususnya dalam bidang industri pertahanan.
2. **Manfaat Praktis:** Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam menentukan dan menjalankan kerjasama di bidang industri pertahanan di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Pada sebuah penelitian sangat penting untuk memperhatikan literatur atau penelitian terdahulu yang disajikan. Penyajian literatur bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil dari penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Cooper 2010; Marshall & Rossman, 2011). Selain itu, tinjauan literatur diperlukan untuk mempertegas atau memperjelas persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya. Tinjauan literatur juga menjadi landasan pentingnya topik ini untuk diteliti, selain itu penyajian tinjauan literatur akan memudahkan pembaca untuk memahami tujuan dari penelitian ini. Oleh sebab itu, di bawah ini disajikan beberapa literatur yang berkaitan erat dengan topik yang diusung pada penelitian ini.

1. Tesis yang berjudul “*Analisa Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur KAI KF-X / IF-X*”, ditulis oleh Mischa Guzel Madian yang merupakan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Tesis ini secara garis besar menganalisis kerjasama Industri Pertahanan

antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya di bidang kedirgantaraan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 KAI KF-X / IF-X. Mischa menggunakan beberapa konsep untuk menganalisa kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan, diantaranya ialah, *Stratification & Tiers* dalam industri pertahanan global, *Revolution in Military Affairs* (RMA), *Military Innovation, Technology Diffusion* dan *Integrative Strategy*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjabarkan secara komprehensif mulai dari tinjauan sejarah kerjasama Indonesia-Korea Selatan, perkembangan industri pertahanan kedua Negara, spesifikasi dari pesawat tempur KAI KF-X / IF-X, hingga Doktrin dan Postur Pertahanan masing-masing Negara. Mischa dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan yang diterapkan dalam pengembangan pesawat tempur bukan merupakan sebuah *Revolution in Military Affairs* (RMA), melainkan hanya bentuk dari *Evolution of Military Affairs*. Hal ini dibuktikan bahwa pesawat tempur tersebut akan memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara. Akan tetapi, secara keseluruhan adanya kerjasama pengembangan bersama alutsista ini tidak akan merubah secara signifikan Doktrin dan Postur pertahanan Indonesia (Madian, Tesis, 2012: 12-24).



2. Jurnal yang ditulis oleh Richard A. Bitzinger dengan Judul “*Toward a Brave New Arms Industry?*”, yang terbit pada 2003. Bitzinger merupakan seorang *senior fellow and coordinator of the Military Transformations Programme* di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore. Penelitian ini dilandasi munculnya fenomena dimana negara-negara *second-tier arms producer* tengah berusaha membangun dan mengembangkan industri pertahanan guna mewujudkan kemandirian pada sektor tersebut. Dalam jurnal ini, Bitzinger memetakan negara-negara menjadi tiga tingkatan berdasarkan kemampuan industri pertahanan nasional, yaitu, *first-tier*, *second-tier* dan *third-tier*. Lebih lanjut, Bitzinger menemukan masalah yang menjadi penghambat dalam pengembangan industri pertahanan di negara-negara berkembang, yaitu adanya batas dan jarak yang jauh antara negara *first-tier* dan *second-tier*. Bitzinger juga menjelaskan bahwa negara-negara *second-tier* seperti Israel, Taiwan, Indonesia dan Korea Selatan masih sulit untuk keluar dari zona tingkat produksi industri kedirgantaraan, dimana negara-negara tersebut masih berorientasi pada produk sipil dan belum mengarah pada produk yang berbasis militer (Bitzinger, 2003: 64-66). Untuk mencapai kemandirian di bidang industri pertahanan, negara seperti Jepang dan Korea Selatan memilih jalan kerjasama dengan negara *first-tier* untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui *transfer technology* atau *production offsets*.

3. Jurnal berjudul “*Indonesia Defense Industry Model Concept: A Study Framework for Defense Industry Building*”, terbit pada Desember 2014, yang merupakan karya dari Sri Hartati, Ade Muhammad, Kartib Bayu dan Muhammad Tasrif, akademisi dari Institut Teknologi Bandung. Secara garis besar jurnal ini bertujuan untuk menjabarkan kondisi sistem industri pertahanan yang ada saat ini, sehingga kemudian dapat dianalisa untuk menentukan model pertahanan mana yang harus diterapkan. Selain itu, dalam jurnal ini dipaparkan beberapa aspek utama yang harus menjadi pertimbangan dalam pendirian dan pengembangan industri pertahanan, diantaranya ialah aspek institusional, aspek *industrial framework* yang di dalamnya terkandung 3 model (model autarky, industrial model niche, global defence industry chain). Penelitian ini menggunakan metode *descriptive research*, *verification study (verificative research)* dan *applied research*, dengan industri pertahanan sebagai unit analisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, saat ini Indonesia lebih cenderung menggunakan *Israeli Model* (industrial model niche) dalam pengembangan industri pertahanan nasional. Kemudian, terdapat model alternatif bagi model industri pertahanan Indonesia, yaitu Japan model. Japan model dianggap lebih atraktif karena lebih menggunakan keunggulan *private sector*. Sehingga, di masa depan sebaiknya Indonesia semakin meningkatkan Japan Model sebagai model pengembangan industri pertahanan nasional (Hartarti, dkk, Jurnal Vol.2 No.4, 2014: 260-265).

4. Jurnal terbitan Turkish Review dengan judul “*Turkish-Israeli Military Relations and Security Cooperation*” ini merupakan karya Berelovich, Eyal. Diterbitkan pada November 2014, jurnal ini secara garis besar membahas mengenai hubungan Turki dan Israel dalam bidang militer dan keamanan. Hubungan Turki dan Israel sangat harmonis pada pertengahan dekade 1990an, yang menjadi alasan terjadinya kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan bilateral guna menciptakan kestabilan regional. Turki dalam hubungan dengan Israel banyak dipengaruhi oleh Turkish Armed Forces (TAF) dalam menetapkan kebijakan luar negeri, sehingga berpengaruh juga terhadap hubungan kerjasama industri pertahanan. Kerjasama ini ditujukan pihak Turki guna memoderinisasi perlengkapan yang pada tentunya ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TAF. Selain itu, Turki menjadikan kerjasama ini sebagai alat untuk menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Kerjasama antara Turki dan Israel terbentuk karena adanya kesamaan dalam memandang kondisi keamanan dan stabilitas regional pada 1993. Kemudian, jurnal ini menjelaskan bahwa mekanisme yang digunakan untuk menjalin kerjasama bilateral Turki dan Israel ialah dialog strategis (*strategic dialogue*). Jurnal ini secara keseluruhan menganalisa bagaimana faktor lain mempengaruhi kerjasama pertahanan kedua negara sejak 1990an hingga awal abad ke-21, seperti pergantian rezim di Turki, pertimbangan masalah di Palestina dimana Turki dan Israel memiliki pandangan yang berbeda, serta faktor

Turki yang merasa bahwa industri pertahanan nasionalnya telah cukup matang (Berelovich dan Eyal, Jurnal Vol.4, 2014: 1-4).

5. Penelitian selanjutnya berjudul “*Revisiting Armaments Production in Southeast Asia: New Dreams, Same Challenges*” yang juga merupakan karya dari Richard A. Bitzinger, yang terbit pada 2013. Jurnal ini mengulas mengenai alasan mengapa negara mengembangkan industri pertahanan nasional. Bitzinger menyimpulkan bahwa terdapat 2 alasan yang mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara. *Pertama*, alasan keamanan menjadi faktor paling utama dalam mengembangkan industri nasional. *Kedua*, alasan ekonomi menjadi faktor lain yang mendorong untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. Jurnal ini mencontohkan bagaimana Indonesia (salah satu dari 3 negara, bersama Malaysia dan Singapura) sebagai negara Asia Tenggara dengan kapabilitas industri pertahanan tertinggi di regionalnya yang mengalami beberapa kendala dalam pengembangan industri pertahanan nasional. Jurnal ini juga mengulas mengenai perkembangan industri pertahanan Indonesia, khususnya PT. DI (Dirgantara Indonesia, dulu dikenal dengan nama IPTN). Jurnal ini memaparkan bagaimana cara Indonesia dalam meningkatkan industri matra udara ini, mulai dari kerjasama dengan Spanyol dalam pembuatan pesawat angkut hingga mampu memproduksi sendiri dan berhasil mengekspor ke UAE, Brunei, Malaysia, Pakistan, Thailand dan Korea Selatan. Selain itu, Bitzinger juga menyimpulkan bahwa negara seperti Indonesia sangat

membutuhkan pendanaan yang besar untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Sementara itu, program *offset* yang diterapkan Indonesia harus dipertimbangkan secara hati-hati, dimana *offset* bukanlah jalan pintas dalam menghadapi kekurangan dana, termasuk juga ketertinggalan teknologi dan inovasi (Bitzinger, Jurnal *Contemporary Southeast Asia* Vol.35, No.3, 2013: 369-387).

6. Jurnal yang merupakan karya Richard A. Bitzinger ini berjudul “*Asian Arms Industries and Impact on Military Capabilities*” ini membahas mengenai peran industri pertahanan terhadap kemampuan angkatan bersenjata, khususnya di wilayah Asia. Secara umum, jurnal yang terbit pada tahun 2017 ini mengungkapkan hal nyaris serupa dengan *literatures* yang telah dibahas sebelumnya dimana kemandirian industri pertahanan pada suatu negara berimbas pada bertambahnya kepercayaan diri negara dalam menghadapi tantangan yang terus berubah pada sistem internasional (*survivable*). Namun, terdapat sesuatu yang dianggap kurang efektif dan efisien dalam upaya mendorong kemandirian industri pertahanan. Bitzinger menjelaskan bahwa dalam mendorong industri pertahanan menuju kemandirian atau setidaknya mampu untuk menghasilkan persenjataan *original / indigenous arms* terlalu sering produk yang dihasilkan lebih mahal daripada persenjataan serupa yang ada di pasar internasional. Selain itu, proses untuk menciptakan *indigenous arms* yang biasanya memakan waktu yang lama, malah menjadikan akses terhadap difusi teknologi dan

inovasi teknologi. Sehingga ketika industri pertahanan suatu negara berhasil menciptakan *indigenous arms*, kemungkinan besar teknologi yang dipakai sudah tertinggal dari yang ada di pasar global. Namun, Bitzinger menjelaskan bahwa sangat tidak mungkin bagi negara-negara di Asia Pasifik untuk dengan mudah meninggalkan jerih payah dari kemampuan membuat produk asli sendiri, meskipun nilai komparatif tersebut sudah berada di bawah produk yang tersedia di pasar global. Secara garis besar jurnal ini membantu menemukan bagaimana korelasi kerjasama industri pertahanan Indonesia-Korea Selatan terhadap kapabilitas militer Indonesia (Bitzinger, 2017: 295).

Dari berbagai tinjauan literatur yang telah disajikan di atas, mayoritas jurnal tersebut berbicara tentang tindakan yang dilakukan negara-negara *second-tier* dalam mengembangkan kapabilitas industri pertahanan nasionalnya. Kemudian, diterangkan juga tantangan / hambatan dalam upaya menjadikan industri pertahanan nasional yang semakin berdaya saing global. Secara keseluruhan terdapat perbedaan bahasan terkait industri pertahanan, mulai dari, tantangan negara-negara berkembang hingga pembahasan mengenai keterkaitan *Revelution Military Affairs* (RMA) dalam kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Namun, terdapat beberapa kemiripan antara *literatures* tersebut, seperti menerangkan kerjasama yang menjadi salah satu solusi bagi *second-tier* dan pembahasan model yang digunakan dalam pengembangan industri pertahanan. Lalu, penelitian ini pun melihat posisi industri pertahanan

Indonesia menggunakan grafik *ladder of production*. Sehingga, ditarik kesimpulan bahwa selain memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian lain, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lainnya. Fokus pada penelitian ini ialah pada implementasi kerjasama di bidang Industri Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan pada 2013-2017, mulai dari proses hingga kesesuaian hasil kerjasama tersebut.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini akan menggunakan konsep yang berkaitan dengan kerjasama industri pertahanan yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan, yaitu Konsep Implementasi Kebijakan, Konsep *Defence Industrial Cooperation*, Konsep Pengembangan Industri Pertahanan, Teori Difusi Teknologi dan Konsep *Stratification and Tiers*.

### **2.2.1. Konsep Implementasi Kebijakan**

Secara sederhana, implementasi merupakan penerapan dari suatu rencana yang telah tersusun. Selanjutnya, Ripley dan Franklin (1986:4) menjelaskan bahwa untuk memahami konsep implementasi kebijakan dibutuhkan pengertian tentang serangkaian kegiatan, seperti sebagai berikut:

*"Implementation is what happens after laws are passed authorizing a program, a policy, a benefit, or some kind of tangible output. The term refers to the set of activities that follow statements of intent about program goals and desired result by government officials, implementation encompasses action (and nations) by variety of actors, especially bureaucrats, designed to put programs into effect".*

Menurut Syukur yang dikutip Surmayadi (2005: 79), ada tiga unsur penting dalam proses implementasi. *Pertama*, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan. *Kedua*, target yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat program, berupa perubahan dan peningkatan. *Ketiga*, adanya unsur pelaksana/ *implementor*, baik individu maupun kelompok untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Kesuksesan implementasi pada suatu program ditentukan berdasarkan variabel, dimana antara satu variabel dengan variabel lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Berikut enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Sudjianto, 2008: 35)

1. Standar dan sasaran kebijakan. Dalam menjalankan sebuah kebijakan, diperlukan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Selain itu, standar dan sasaran dari sebuah kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumber daya. Keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Hingga saat ini, manusia merupakan sumber daya yang memegang peranan



terpenting dalam capaian implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya non-manusia seperti finansial dan waktu menjadi pertimbangan dalam keberhasilan suatu program. Kekurangan pada salah satu sumber daya terutama pada sektor finansial merupakan penyebab tidak maksimal atau bahkan gagalnya implementasi sebuah kebijakan.

3. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu mempengaruhi implementasi suatu program.
4. Sikap para pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, sikap penerimaan dan penolakan agen pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi. Oleh sebab itu diperlukan keselarasan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.
5. Hubungan antar pihak. Komunikasi dan kordinasi antara pihak yang terlibat kerjasama memainkan posisi penting dalam perjalanan implementasi. Semakin baik kordinasi dan komunikasi antar pihak merupakan salah satu cara untuk meminimalisir adanya kegagalan dalam sebuah implementasi.
6. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel terakhir yang harus diperhatikan untuk mengukur kinerja implementasi ialah sejauh mana kondisi eksternal turut mendorong keberhasilan implementasi sebuah program. Lingkup eksternal ini mencakup kondisi ekonomi, sosial dan politik. Untuk mendukung sebuah implementasi, diperlukan kondisi eksternal yang kondusif sehingga kegagalan implementasi bisa diminimalisir, terlebih implementasi dari sebuah kerangka kerjasama yang luas *state to state*.

Konsep ini digunakan untuk membantu peneliti dalam melihat kesesuaian antara perjanjian dan implementasi / pelaksanaan pada program kerjasama industri pertahanan yang dijalin Indonesia dan Korea Selatan pada periode 2013-2017. Selain itu, konsep ini membantu peneliti untuk menganalisis dinamika dalam implementasi kerjasama antara kedua negara.

### **2.2.2. Konsep *Defence industrial cooperation***

Kerjasama industri pertahanan merupakan konteks kerjasama yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan kerjasama internasional. Bila dirunut lebih jauh, kerjasama dalam bidang industri pertahanan merupakan salah satu bentuk penerapan dari *defence diplomacy*. Dalam sebuah jurnal yang berjudul “*A Case Study of Russo-Ukrainian Defense Industrial Cooperation: Russian Dilemmas*” menjelaskan mengenai definisi *defence industrial cooperation*. Tomas Malmlof mengemukakan pendapatnya mengenai kerjasama industri pertahanan, yaitu:

*“Defense industrial cooperation is a concept that comes in many different forms. According to these, defense industrial cooperation refers to any of joint industrial R&D; procurement of foreign technology or military systems, critical subsystems or components with at least the partial aim of bringing added value to at least one of the participants in terms of access to new technology; license manufacturing; cooperative ventures; or any other outcome enhancing their defense industrial prospects.”*

(Malmlof, *Journal of Slavic Military Studies* Vol.29, No.1, 2016: 3).

Konsep ini menegaskan bahwa tujuan dari dijalinnya kerjasama industri pertahanan ialah untuk meningkatkan kapabilitas dan prospek industri pertahanan nasional. Lebih lanjut, konsep ini menjelaskan bahwa kerjasama industri pertahanan dilakukan untuk mewujudkan kepentingan nasional aktor-aktor yang terlibat di dalam kerjasama tersebut, baik kepentingan yang berorientasi pada sektor pertahanan maupun sektor perekonomian. Konsep ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam mengerucutkan bentuk kerjasama internasional ke arah yang lebih spesifik yaitu kerjasama industri pertahanan.

### **2.2.3. Konsep Pengembangan Industri Pertahanan**

Dewasa ini, negara-negara berkembang mulai berupaya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan untuk mencapai kemandirian dalam industri pertahanan. Di dalam lingkup industri pertahanan global, terdapat 3 model yang sering menjadi acuan negara untuk mengembangkan industri pertahanan, yaitu *autarky model*, *niche-production model* dan *global supply chain model* (Lim, 1983: 377-384). Pemilihan model pengembangan industri pertahanan oleh sebuah negara merupakan penyesuaian dari potensi dan keadaan industri pertahanannya. Selain itu, negara memetakan hambatan yang berpotensi atau tengah dialami, sehingga nantinya sebuah negara dapat menerapkan model yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan. Di bawah ini

dijelaskan mengenai ketiga model pengembangan industri pertahanan.

**a. *Autarky Model***

*Autarky model* merupakan model pengembangan industri pertahanan yang diterapkan suatu negara yang berambisi untuk mencapai kemandirian pertahanan, yang tentunya harus didukung dengan postur pertahanan yang besar. Kemandirian pertahanan suatu negara diukur dari: (1) kapasitas negara untuk menguasai teknologi militer yang dibutuhkan untuk membuat sistem senjata, (2) kapasitas finansial nasional untuk membiayai produksi sistem senjata, (3) kapasitas industri nasional untuk memproduksi sistem senjata di dalam negeri. Model ini dapat dicapai suatu negara apabila memiliki kemampuan untuk setidaknya mencapai 70% dari tiga hal tersebut, yaitu teknologi, finansial dan produksi sistem senjata.

Untuk mencapai model ini, diperlukan empat strategi yang harus diterapkan. *Pertama*, merumuskan strategi pengembangan jangka panjang. *Kedua*, adanya komitmen politik jangka panjang dalam hal pendanaan untuk menjamin kesinambungan program. *Ketiga*, melakukan konsolidasi industri pertahanan nasional dengan cara menetapkan dua konsorsium strategis. *Keempat*, merintis aliansi industri pertahanan tingkat regional dan global.

**b. *Niche-production Model***

*Niche-production model* merupakan model yang diterapkan oleh negara yang berupaya untuk mengurangi ketergantungan senjata terhadap produk asing. Cara yang digunakan ialah dengan mengembangkan kapasitas industri nasional untuk menguasai teknologi utama militer. Penguasaan teknologi ini diperlukan untuk mengembangkan delapan sistem senjata konvensional yang menjadi prioritas, diantaranya: senjata kecil dan ringan, tank kelas utama, kapal perang permukaan, kapal selam, pesawat tempur, helikopter serbu, rudal, sistem komunikasi dan penginderaan militer. Model ini menghendaki adanya komitmen dalam melakukan investasi ke sektor industri pertahanan, terutama dalam upaya untuk mendapatkan *transfer of technology* dari negara yang memiliki kondisi teknologi persenjataan yang lebih mapan.

**c. *Global Supply Chain Model***

*Global Supply Chain Model* merupakan model yang cenderung dilakukan oleh negara-negara yang tergolong mapan dalam penguasaan teknologi, tetapi kesulitan dalam menembus pasar senjata global. Hambatan ini menjadikan negara penganut model ini harus melakukan rasionalisasi produksi senjata dengan cara mengintegrasikan produksi senjatanya ke suatu konsorsium industri pertahanan global. Kemudian, rasionalisasi ini akan

dilakukan dengan tiga metode utama. *Pertama*, penciptaan konsorsium senjata tingkat regional dan global. *Kedua*, mobilisasi sumber finansial dari sektor swasta lintas negara untuk membiayai investasi ke sektor industri pertahanan. *Ketiga*, penyebaran teknologi militer dari produsen senjata utama ke anggota konsorsium.

Melalui konsep pengembangan industri pertahanan ini, penulis dapat melihat dan menyimpulkan konsep pengembangan yang tengah diterapkan Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional.

#### **2.2.4. Teori Difusi Teknologi**

Tingkat kecanggihan teknologi persenjataan yang dimiliki negara sangat mempengaruhi posisi negara dalam sistem internasional. Semakin negara memiliki kemampuan dalam menciptakan persenjataan dengan kualitas teknologi yang tinggi, maka hal ini akan menjadi daya tawar / *bargaining* bagi negara tersebut dalam melakukan perundingan maupun interaksi dengan pihak lain. Pentingnya teknologi dalam sistem pertahanan negara sangat dirasakan, terutama saat terjadi perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam perang yang juga dikenal dengan *arms race* tersebut, tingkat kecanggihan teknologi persenjataan kedua pihak tersebut menjadi titik utama dalam perang dingin.

Contoh lain yang menggambarkan pentingnya kecanggihan teknologi persenjataan tercermin dari peristiwa invasi Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama di wilayah Iraq. Dalam upaya Amerika Serikat untuk meruntuhkan rezim Saddam Husein, terlihat peran teknologi persenjataan yang semakin dominan dalam perang modern atau *digital battlefield*. Penggunaan *Global Positioning System* (GPS) guna mendukung *Unmanned Air Vehicle* (UAV) menjadikan Amerika lebih mudah dalam melihat keadaan wilayah musuh, dan tentunya sangat membantu dalam melumpuhkan sistem pertahanan udara musuh.

Dalam menjalin kerjasama industri pertahanan, negara-negara yang tengah berupaya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan tentunya berharap adanya sebuah peningkatan kualitas teknologi dari kerjasama tersebut. Menurut Amitav Mallik dalam bukunya yang berjudul "*Technology and Security in the 21<sup>st</sup> Century: A Demand-Side Perspective*", Mallik menjelaskan apa dan bagaimana persebaran teknologi atau difusi teknologi terjadi:

*"Technology diffusion may be defined as the natural spread of technology through every type of technology interaction, whether acquisition, development, transfer, co-production or even intellectual exchange"* (Amitav Mallik, 2004: 103)

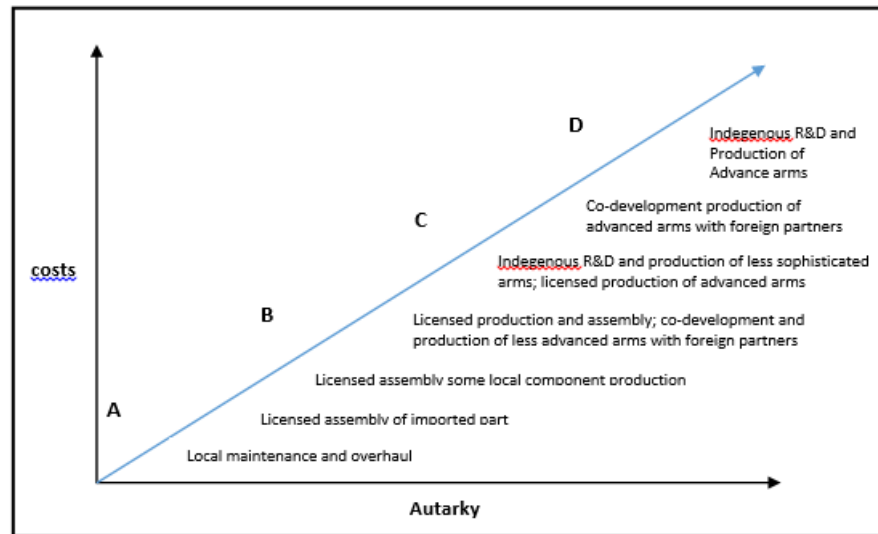
Dari pendapat Mallik, dapat disimpulkan bahwa dalam interaksi yang dilakukan aktor internasional dalam hal persenjataan merupakan bagian dari difusi teknologi. Tentu apa yang dilakukan

Indonesia dan Korea Selatan dalam kerjasama industri pertahanan sangat berkaitan dengan difusi teknologi. Oleh sebab itu, konsep ini menjadi acuan peneliti dalam melihat dan memaparkan media persebaran teknologi dalam kerjasama industri pertahanan yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan.

#### **2.2.5. Konsep *Stratification and Tiers***

Seperti yang telah disajikan pada bagian latar belakang, Richard. A Bitzinger menjelaskan bahwa dalam industri pertahanan global, terdapat tingkatan yang memisahkan antar negara. *Pertama, first-tier* selaku negara yang dominan dalam industri pertahanan global dengan tingkat kecanggihan teknologi dan pendanaan. *Kedua, second-tier* sebagai golongan yang memainkan sebagian peran *first-tier* dan memainkan peran *third-tier*. *Ketiga, third-tier* yang merupakan golongan terbawah dalam stara industri pertahanan global, dengan tingkat penguasaan produksi baik kualitas maupun kuantitas yang masih sangat rendah. Grafik di bawah ini merupakan gambaran yang lebih spesifik mengenai pembagian tingkatan kapabilitas industri pertahanan global.



Grafik 2.1. *Ladder of Production*

Sumber: Richard Bitzinger, *Toward a Brave New Arms Industry*, 2003.

Bila membandingkan tingkatan yang ada pada grafik ladder of production, maka negara *first-tier* menempati posisi tertinggi atau berada pada tingkatan “D”. Pada posisi ini, industri pertahanan suatu negara dianggap mandiri serta riset dan pengembangan untuk bertahan di posisi tersebut terlihat jelas. Sementara itu, negara *second-tier* berada pada pada tingkatan “C”. Namun, pada bagian *second-tier*, Bitzinger mengelompokkannya menjadi dua tingkat, dimana tingkat “C” yang paling tinggi merupakan posisi yang dihuni oleh negara yang tingkat kemajuan dan kapabilitas jenis produksi senjatanya sudah mampu menghasilkan alutsista secanggih *first-tier* (meskipun merupakan hasil kerjasama), sedangkan tingkat “C” yang kedua dihuni oleh negara yang belum mampu membuat alutsista secanggih *first-tier*. Bagi negara-negara yang tergolong ke dalam *third-tier* pun begitu, terbagi menjadi dua tingkat, dimana tingkat

“A” terbawah merupakan posisi bagi negara-negara yang hanya mampu melakukan *maintenance* atau pemeliharaan alutsista saja. Selain menjelaskan tingkatan industri pertahanan suatu negara, grafik ini juga mencakup tantangan yang harus ditempuh oleh negara yang berupaya untuk mencapai level teratas, termasuk cara masuk dan bersaing dalam pasar persenjataan global.

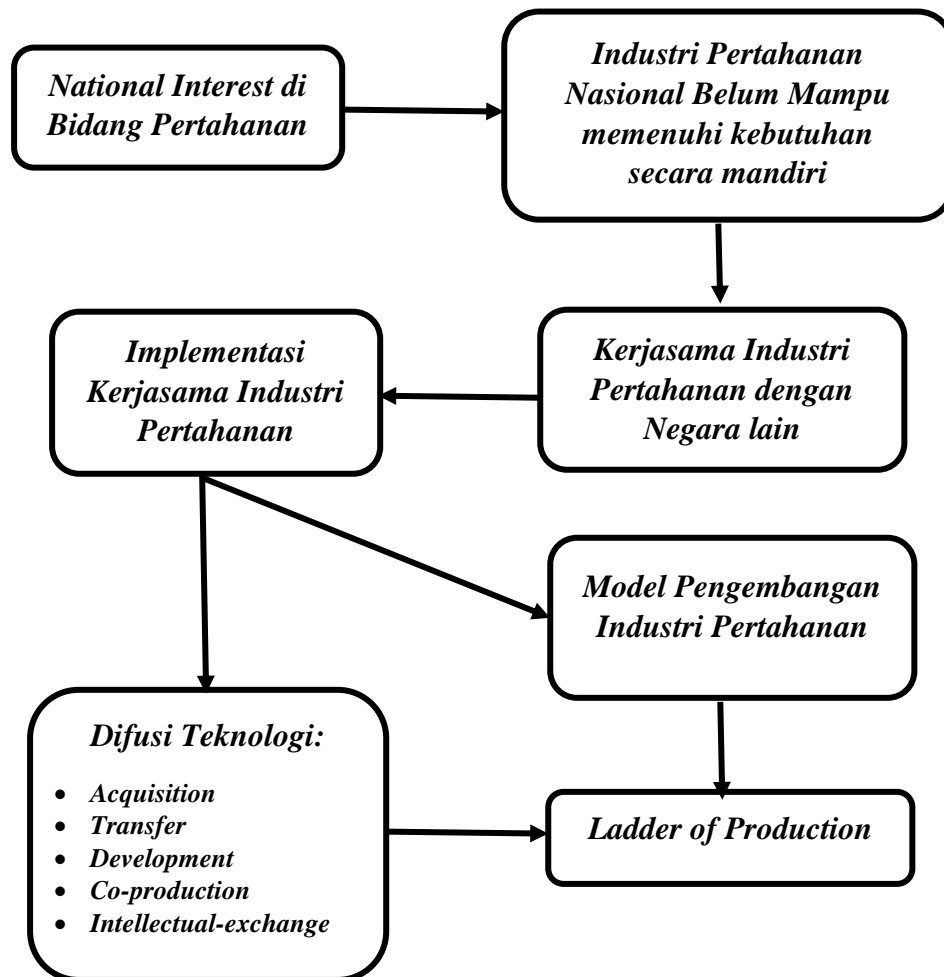
Melalui grafik ini, peneliti dapat lebih mudah dalam memetakan bagaimana kerjasama industri pertahanan yang dijalin Indonesia dan Korea Selatan, apakah menuju ke arah yang sesuai untuk mencapai kemandirian di bidang industri pertahanan bagi Indonesia, atau malah sebaliknya.

### **2.3. Kerangka Pikir**

Kebutuhan angkatan bersenjata Indonesia terhadap kualitas dan kuantitas alutsista menjadikan acuan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kapabilitasnya. Namun, belum adanya kemampuan industri pertahanan nasional untuk memenuhi kebutuhan itu secara mandiri. Kerjasama dengan negara lain merupakan salah satu cara yang ditempuh Indonesia dalam menyikapi kekurangan industri pertahanan nasional, diantaranya ialah kerjasama industri pertahanan yang dijalin dengan Korea Selatan. Dengan menggunakan konsep Difusi Teknologi, maka dapat dilihat media persebaran yang terjadi dalam kerjasama industri pertahanan tersebut. Selanjutnya dari model pengembangan yang digunakan Indonesia

dan dipadukan dengan difusi teknologi, maka pada bagian akhir dapat ditentukan posisi Indonesia dalam industri pertahanan global dengan dibantu grafik *ladder of production*. Sehingga, berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pikir dalam skripsi ini apabila digambarkan dalam bentuk skema terlihat seperti gambar berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Penulis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dapat dimaknai sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek dan objek dalam sebuah penelitian. Kemudian, penelitian ini menyajikan data dan pembahasan mulai dari sejarah industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan hingga ke tahap implementasi kerjasama antar kedua negara pada periode 2013 hingga 2017. Lalu, dalam penulisan laporan akhir disajikan dengan kerangka yang fleksibel (Bakry, 2016: 14-15).

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dicapai. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Penelitian ini terfokus pada implementasi kerjasama Industri Pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam kurun waktu 2013 hingga 2017. Penelitian ini dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu:

- a. Perjanjian kerjasama industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan.
- b. Implementasi & dinamika kerjasama industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan periode 2013-2017.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu, data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari tangan / pihak pertama atau pihak yang berkaitan (Uma Sekaran, 2011), serta data sekunder, yaitu jenis data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, seperti jurnal, dokumentasi serta data / informasi yang berasal dari internet (Creswell, 2014: 248). Sumber data pada penelitian ini antara lain bersumber dari transkrip hasil wawancara, dokumentasi, jurnal, termasuk data / informasi yang berasal dari internet

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, dokumentasi dan wawancara.

#### **a. Studi kepustakaan.**

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan

dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (Nazir, 1998: 112). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi yang berasal dari buku, jurnal serta hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

**b. Studi Dokumentasi.**

Menurut Arikunto (2006:158) Studi Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan. Data dapat berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia, Korea Selatan dan pihak lainnya. Dalam penelitian ini, bentuk data yang didapat seperti *Memorandum of Understanding (MoU)* atau bentuk perjanjian lainnya antara kedua belah pihak. Termasuk juga rezim dan norma internasional yang mengikat kedua negara.

**c. Wawancara.**

Wawancara adalah pertemuan dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi (Sugiono, 2009: 317). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber Letnan

Kolonel (Tek) Nanang F. Alamie selaku pejabat Kepala Seksi Ekspor & Impor, Subdirektorat Perizinan, Direktorat Teknologi Industri Pertahanan (Dittekindhan), Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan panduan dan hasil wawancara terlampir.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada fenomena yang terjadi dalam kerjasama industri pertahanan yang dijalin Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis triangulasi guna mengecek keabsahan data (Moloeng, 2004: 330). Lalu, pada penggunaan konsep / teori yang dihubungkan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Proses analisis data terdiri dari 3 bagian, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992:16).

- a. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan diverifikasi.

- b. Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, data akan lebih terorganisir dan tersusun, sehingga semakin mudah dipahami. Peneliti melakukan pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi data. Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan.
- c. Tahap terakhir dalam analisis data ini adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi berdasarkan data dan melakukan interpretasi berdasarkan sudut pandang dengan mengkaitkan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Industri pertahanan semakin memainkan peran penting dalam hubungan antar negara, baik untuk menyokong kebutuhan pertahanan hingga menjadikannya sebagai sumber pemasukan negara. Indonesia dan Korea Selatan pun menjadi negara yang berusaha memaksimalkan potensi tersebut dengan meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional masing-masing. Oleh sebab itu, bab ini menyajikan perkembangan industri pertahanan global secara umum, dilanjutkan dengan perkembangan industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan, kemudian sub-bab ini akan berisikan sejarah kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan.

Penyajian sub-bab mengenai perkembangan industri pertahanan dunia bertujuan untuk menunjukkan bagaimana industri pertahanan bertransformasi menjadi sektor yang penting dalam upaya negara mempertahankan eksistensinya. Hal ini menjadikan industri pertahanan sebagai program prioritas, termasuk bagi Indonesia dan Korea Selatan. Sehingga penting untuk melihat proses Indonesia dan Korea Selatan dalam upaya peningkatan kapabilitas industri pertahanan untuk mencapai kemandirian di bidang tersebut. Kemudian, sub-bab mengenai sejarah kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan bertujuan untuk menunjukkan intensitas interaksi kedua negara. Hubungan yang diawali dengan interaksi tingkat konsuler, berkembang ke arah kerjasama dalam bidang ekonomi,

budaya, ketenagakerjaan, hingga menyentuh tingkat kerjasama di bidang strategis yaitu pertahanan, terutama kerjasama industri pertahanan (<http://overseas.mofa.go.kr>).

#### 4.1. Perkembangan Industri Pertahanan Dunia

Dalam menghadapi dinamika sistem internasional, tentu diperlukan rencana pengembangan yang sesuai dengan keperluan negara untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri maupun keamanan regional, hingga mampu menjadi alat tawar dalam melakukan perundingan dengan pihak lain. Menurut Hans J. Morgenthau dalam buku yang berjudul *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, terdapat 9 elemen yang menjadi daya ukur *power* suatu negara. Dua diantaranya ialah kapabilitas industri dan tingkat penguasaan teknologi (*military preparedness*) negara tersebut. (Morgenthau, 1997: 127).<sup>2</sup> Senada dengan pendapat Morgenthau, K.J.Holsti mengungkapkan bahwa untuk mengetahui kekuatan dan kapabilitas negara, digunakan dua terminologi yaitu *great power* dan *small power*. Kedua hal tersebut dapat dibedakan berdasarkan pada faktor *tangible* dan *intangible*. Faktor *tangible* diantaranya ialah populasi penduduk, teritorial, sumber alam dan kapasitas industri, kapasitas pertanian, dan kekuatan militer. Kemudian, faktor *intangible* ialah kepemimpinan, efisiensi organisasi birokrasi, persatuan masyarakat,

---

<sup>2</sup> Sembilan elemen *power*: Geography, Natural Resources, Industrial Capacity, Military Preparedness, Population, National Character, National Morale, The Quality of Diplomacy, The Quality of Government.

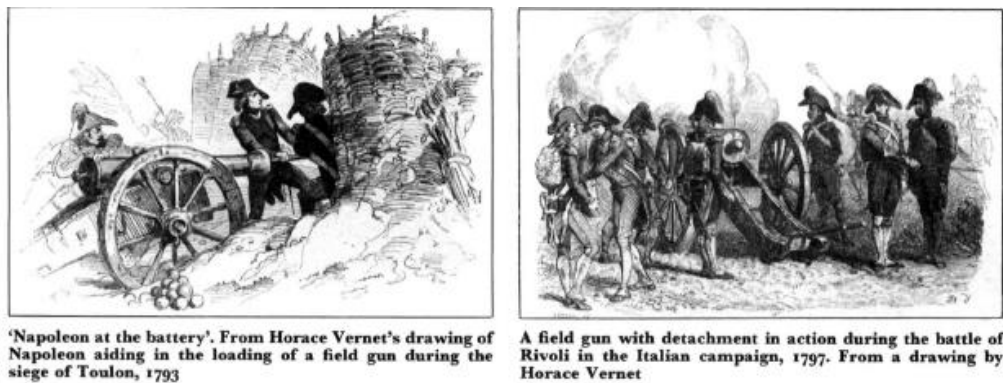
reputasi, dan musibah. (Holsti, 1981: 206). Pendapat kedua tokoh tersebut menegaskan industri pertahanan sebagai faktor penentu eksistensi suatu negara, pun termasuk penentu posisi tawar negara dalam politik internasional. Pengembangan industri pertahanan menjadi suatu fenomena global, dimana pengembangan industri pertahanan tidak hanya untuk menghadapi kondisi perang, namun juga dipersiapkan dalam dan untuk kondisi damai.

Jauh sebelum keberadaan alutsista canggih seperti saat ini, konsep mengenai peralatan canggih semisal kapal selam sudah dicetuskan pada 1578 oleh William Bourne, seorang berkebangsaan Inggris. Konsep ini berupa kapal yang berbentuk seperti drum yang terbuat dengan bahan dasar berupa kayu. Namun, realisasi pertama dari proyek ini dilakukan oleh warga Belanda bernama Cornelius Drebbel pada 1620, dan akhirnya dihasilkan sebuah kapal selam sederhana yang mampu menyelam, meskipun hanya memiliki daya tahan selama tiga jam di dalam air (<https://www.republika.co.id>). Namun, peristiwa ini belum mampu menjadi pelopor inovasi dalam bidang pertahanan.

Pada abad 18, terjadilah revolusi industri yang menjadi momentum perubahan peradaban manusia. Revolusi industri terjadi Inggris yang ditandai dengan restrukturalisasi industri tekstil dan besi. Industrialisasi ini kemudian diikuti oleh negara lain seperti Prancis, Jerman dan Amerika Serikat. Teknologi mulai mengambil peran penting dalam kehidupan manusia, dimana teknologi kala itu sangat dibutuhkan untuk mengelola sumber daya seperti biji besi, tembaga dan minyak mentah (Ladenburg,

www.digitalhistory.uh.edu: 1-3). Revolusi industri pun memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan persenjataan dunia, dimana penemuan senjata berbasis teknologi mulai muncul dan mengambil peran dalam sebuah peperangan. Peperangan pada era Napoleon menjadi salah satu sejarah perkembangan persenjataan dunia, dimana Napoleon memiliki pasukan yang dibekali meriam, yang disebut sebagai pasukan artileri (Wilkinson & Roffe, 1975: 3).

**Gambar 4.1. Napoleon's Artillery**



*Sumber: Robert Wilkinson-Latham & Michael Roffe, 1975: 3*

Pada Perang Dunia I (1914-1918) tercatat sebagai kemunculan tank untuk pertama kalinya, dimana seorang industrialis Amerika bernama Benjamin Holt menjadi pelopornya. Tank kala itu berasal dari modifikasi traktor yang ditujukan untuk menerobos medan seperti parit yang berlumpur. Konsep ini kemudian dimanfaatkan Jerman dengan menutup traktor dengan plat logam tebal ditambah dengan senapan mesin dan meriam (<https://www.jejaktapak.com>). Di bidang avionik, kemunculan pesawat tempur sudah memainkan peran penting dalam Perang Dunia I, akan tetapi pesawat tempur kala itu masih menggunakan baling-baling

(propeller). Kemudian, Jerman menjadi pelopor atas terciptanya revolusi di sektor avionik dengan kemunculan *Me-262 Schwalbe*, pesawat tempur pertama yang menggunakan mesin jet ditambah dengan penggunaan misil yang menempel pada pesawat tersebut (<http://www.grid.id>).

Keberadaan industri pertahanan bagi suatu negara memiliki pengaruh yang besar dalam interaksi di dunia internasional. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, sebagian besar negara mengembangkan gagasan bahwa fitur utama bagi keamanan ialah *Defence Industrial Based* (The Defence Industry in the 21<sup>st</sup> Century: 2). Terlebih ketika terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, industri pertahanan memainkan peran penting dalam gesekan yang terjadi antara kedua negara. Kedua negara beradu kualitas dan kuantitas produk pertahanan masing-masing untuk menunjukkan kedigdayaan serta berusaha untuk memberikan efek getar bagi pesaingnya. Meskipun terlihat industri pertahanan menunjukkan tren yang kuat, namun industri pertahanan juga sempat mengalami kondisi yang fluktuatif. Industri pertahanan sempat mengalami penurunan akibat dari peristiwa runtuhnya Tembok Berlin pada 1989. Peristiwa ini menyebabkan turunnya anggaran pertahanan negara-negara antara tahun 1989 hingga 1996.

Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan keinginan negara untuk berinovasi dalam mengembangkan produk pertahanan. Inovasi yang dilakukan ialah mulai dari perubahan bentuk senjata tradisional yang besar menjadi senjata yang lebih kecil dengan presisi yang tinggi. Pada perang di Irak tahun 2003, Amerika Serikat menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle*

(UAV) atau pesawat tanpa awak untuk melumpuhkan pos pertahanan lawan. Ini merupakan bukti bahwa industri pertahanan dunia telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Selain itu, di era milenium mulai bermunculan negara-negara *second-tier* seperti India dan Turki yang berhasil mengadopsi teknologi yang didapat dari kerjasama dengan negara *first-tier*. Negara-negara yang tergolong kurang dalam penguasaan teknologi mulai berusaha untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasionalnya dengan berbagai cara, termasuk cara yang dilakukan Indonesia, Korea Selatan, India dan Turki, yaitu kerjasama dengan negara lain. Negara-negara ini berusaha untuk merubah konsep pengembangan industri pertahanan nasional dari sebelumnya mengadopsi *niche-production model* atau *global supply chain model* menuju ke arah *autarchy model*, sehingga industri pertahanan tidak hanya menjadi instrumen yang bergerak di bidang pertahanan, namun juga berorientasi pada bidang ekonomi. *Autarchy model* dianggap sebagai model yang cocok untuk diterapkan bagi negara yang bertumpu pada ambisi kemandirian pertahanan. Model ini sangat relevan bagi negara yang memiliki tujuan untuk menjadi kekuatan utama dalam lingkup global, meskipun diperlukan komitmen dan kematangan dalam sektor SDM, teknologi dan juga finansial.

Menurut Thomas W. Zarzecki, setidaknya ada empat penjelasan utama mengapa transfer senjata internasional terjadi. *Pertama*, akibat dari sistem internasional yang anarki, maka transfer senjata internasional terjadi. Keadaan tersebut menjadikan negara memiliki keharusan untuk mempertahankan eksistensi dengan menjamin sendiri keamanannya.

*Kedua*, adanya kepentingan ekonomi-bisnis terutama dari negara-negara pengekspor persenjataan, terutama bagi negara-negara yang maju dalam bidang industri pertahanan. *Ketiga*, adanya faktor-faktor politik pada tataran domestik yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu adanya konflik sipil dan sistem politik yang diterapkan di sebuah negara. *Keempat*, menekankan pada faktor-faktor ekonomi pada tataran domestik. Menurut pandangan ini, produksi senjata merupakan fungsi dari sumber-sumber daya yang tersedia yang dimiliki oleh setiap negara (Zarzecki, 2002: 46-49). Dari berbagai penjelasan tersebut, ada kecenderungan bahwa faktor utama perkembangan industri pertahanan saat ini merupakan bentuk dari kepentingan ekonomi-bisnis, bukan lagi faktor sistem internasional yang anarki. Negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang kompeten, tentu berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dapat dihasilkan dari sektor tersebut.

Tabel 4.1. 25 Negara Eksportir Persenjataan Global dan Kliennya

Exporter	Share of arms exports (%)		Per cent change from 2008-12 to 2013-17 <sup>a</sup>	Main clients (share of exporter's total exports, %), 2013-17		
	2013-17	2008-12		1st	2nd	3rd
1 United States	34	30	25	Saudi Arabia (18)	UAE (7.4)	Australia (6.7)
2 Russia	22	26	-7.1	India (35)	China (12)	Viet Nam (10)
3 France	6.7	5.8	27	Egypt (25)	China (8.6)	India (8.5)
4 Germany	5.8	7.4	-14	South Korea (14)	Greece (11)	Israel (8.7)
5 China	5.7	4.6	38	Pakistan (35)	Bangladesh (19)	Algeria (10)
6 United Kingdom	4.8	3.8	37	Saudi Arabia (49)	Oman (14)	Indonesia (9.9)
7 Spain	2.9	2.9	12	Australia (34)	Turkey (14)	Saudi Arabia (8.3)
8 Israel	2.9	2.1	55	India (49)	Azerbaijan (13)	Viet Nam (6.3)
9 Italy	2.5	2.4	13	UAE (12)	Turkey (10)	Algeria (9.9)
10 Netherlands	2.1	2.1	14	Jordan (15)	Indonesia (15)	USA (11)
11 Ukraine	1.7	2.5	-26	Russia (23)	China (20)	Thailand (12)
12 South Korea	1.2	0.8	65	Indonesia (26)	Iraq (24)	Philippines (11)
13 Switzerland	0.9	1.1	-11	Saudi Arabia (20)	China (17)	USA (11)
14 Sweden	0.9	2.0	-53	UAE (17)	Thailand (16)	Saudi Arabia (13)
15 Turkey	0.8	0.4	145	Turkmenistan (31)	UAE (24)	Saudi Arabia (16)
16 Canada	0.8	1.0	-18	Saudi Arabia (19)	India (11)	USA (9.4)
17 Norway	0.6	0.6	14	Finland (29)	Oman (23)	USA (18)
18 Belarus	0.4	0.4	12	Viet Nam (26)	China (26)	Sudan (23)
19 Australia	0.3	0.3	15	USA (51)	Indonesia (28)	Oman (8.5)
20 Czech Republic	0.3	0.1	467	Iraq (44)	USA (19)	Viet Nam (11)
21 South Africa	0.2	0.6	-51	UAE (22)	India (8.7)	Nigeria (7.0)
22 UAE	0.2	0.1	320	Egypt (52)	Jordan (26)	Kuwait (6.9)
23 Finland	0.2	0.3	-5.7	Poland (59)	Sweden (11)	Saudi Arabia (5.8)
24 Brazil	0.2	0.3	-20	Afghanistan (32)	Indonesia (31)	Angola (9.3)
25 Portugal	0.2	0.1	74	Romania (90)	Belgium (7.1)	Uruguay (2.8)

Sumber: SIPRI Fact Sheet, March 2018

Menurut data yang dihimpun dari Stockholm International Peace Research Institutut (SIPRI), dalam kurun satu dekade terakhir, pasar persenjataan internasional dikuasai oleh lima negara anggota tetap *UN Security Council*.<sup>3</sup> Peran yang dimainkan industri pertahanan yang tidak lagi sebagai penopang bidang pertahanan, namun juga menopang sektor ekonomi, menjadikan negara dengan kapabilitas industri pertahanan yang tinggi berupaya untuk mempertahankan kondisi ini. Terjadi monopoli

<sup>3</sup> United Nations Security Council / Dewan Keamanan PBB: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Tiongkok.



dalam dinamika industri pertahanan global oleh negara dengan kapabilitas industri pertahanan yang tinggi, terutama oleh lima negara teratas eksportir persenjataan global. Monopoli didukung dengan adanya berbagai regulasi dalam transfer senjata internasional yang bertujuan untuk membendung perkembangan persenjataan yang mengancam kestabilan, misalnya terjadi *arms race* / perlombaan senjata, maka dilakukan pelucutan atau pengendalian senjata.

Pelucutan senjata dilakukan dengan tujuan untuk menghentikan atau memusnahkan senjata yang dimiliki oleh pihak tertentu yang dirasa mampu mengancam keberlangsungan pihak lainnya, seperti nuklir misalnya. Pelucutan ini dilakukan dengan menghentikan proliferasi vertikal dengan cara memaksa negara untuk segera memusnahkan jenis-jenis senjata yang disepakati akan dimusnahkan, dan/ atau menghentikan proliferasi horisontal senjata jenis tertentu ke negara-negara lain yang belum memiliki persenjataan tersebut (Widjajanto & Keliat, 2005: 39-40). Sementara dalam upaya pengendalian senjata biasanya dilakukan dengan menerapkan prinsip *Graduated Reciprocation in Tension-Reduction* (GRIT) yang diperkenalkan oleh Charles Osgood. Perimbangan dilakukan dengan memberikan batas akumulasi senjata tertentu baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Osgood, 1962).

Metode pengendalian GRIT dioperasionalkan dengan metode struktural dan operasional (*structural and operational arms control*) (Baylis, 2002: 185). Pengendalian senjata struktural dilakukan dengan

tujuan untuk mengatur kualitas dan kuantitas proses pengembangan persenjataan, kemudian diterapkan dengan membuat regulasi yang membatasi rancangan kualitatif persenjataan, kuantitas produksi persenjataan, distribusi persenjataan dan gelar pasukan, hingga kepada penggunaan aktual persenjataan oleh angkatan bersenjata. Pengendalian senjata operasional diterapkan untuk membatasi perilaku agresif angkatan bersenjata dengan cara mengatur pergelaran kekuatan militer serta penerapan operasi militer yang provokatif. Selain itu, terdapat bentuk lain dari pengendalian senjata operasional, yaitu Kode Etik Arias yang diusulkan oleh Oscar Arias, penerima nobel perdamaian yang juga mantan Presiden Kosta Rika. Kode Etik Arias merupakan suatu kerangka normatif yang mengatur perdagangan senjata antar pemerintah. Bentuk ini merupakan bagian dari rejim pengendalian senjata yang berupaya mengendalikan proliferasi senjata dari sisi produsen atau penjual senjata (*supply-side arms control*).

Penerapan Kode Etik Arias dilakukan dengan melarang negara produsen untuk: *satu*, menjual senjata, amunisi, komponen-komponen senjata; *dua*, melakukan transfer teknologi yang memiliki kegunaan militer; dan *tiga*, melakukan kerjasama pelatihan militer, kepada negara-negara yang tidak dapat memenuhi kriteria yang terkandung dalam Kode Etik Arias. Berikut kriteria yang harus dievaluasi oleh produsen dan penjual terhadap negara konsumen sebelum terjadinya transaksi jual-beli senjata (Goldblat, 2002:142):

1. Kepatuhan terhadap standar Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional;
3. Penghormatan terhadap hak-hak politik demokratis warga negara, yang ditunjukkan dengan adanya suatu mekanisme pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia serta adanya kontrol sipil terhadap militer;
4. Pengakuan terhadap embargo senjata dan larangan kerjasama militer yang diberikan oleh PBB atau organisasi regional tempat negara konsumen berada;
5. Keikutsertaan negara konsumen dalam Sistem Pendataan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*UN Register of Conventional Arms*);
6. Komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan global;
7. Komitmen terhadap kontra-terorisme;
8. Komitmen terhadap pembangunan manusia (*human development*) yang ditandai dengan proporsi belanja negara untuk kesehatan dan pendidikan lebih besar dari belanja negara.

Selain dari pelucutan dan pengendalian, terdapat regulasi di tataran multilateral yang harus dilakukan oleh negara anggota PBB yaitu *Guidelines for International Arms Transfer*. Dokumen ini dikeluarkan oleh *UN Disarmament Commission* pada 3 Mei 1996 dengan tujuan untuk mengidentifikasi cara-cara untuk mengatasi masalah transfer persenjataan.

Tabel 4.2. Kewajiban Negara Anggota PBB dalam Rejim Transefer Senjata Internasional

	Kewajiban Negara Anggota	Keterangan
1.	Kontrol hukum yang efektif terhadap <i>illicit arms trafficking</i>	Harus menjamin bahwa negara anggota PBB memiliki sistem hukum dan / atau regulasi dan prosedur administrative untuk melakukan control efektif terhadap ekspor dan impor senjata dalam upaya untuk mencegah <i>illicit arms trafficking</i>
2.	Mengkaji prosedur dan legislasi terhadap control senjata	Harus mengkaji prosedur dan legislasi control senjata mereka dan jika perlu meningkatkan keefektifannya untuk mencegah produksi, perdagangan dan pemilikan senjata yang illegal di teritorinya.
3.	Pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi	Harus mengintensifkan upaya-upaya untuk mencegah korupsi dan penyusunan dalam hubungannya dengan transfer senjata dan membuat usaha-usaha untuk mengidentifikasi, membawa ke pengadilan orang-orang yang terlibat dalam <i>illicit arms trafficking</i> .
4.	Sistem lisensi impor yang efektif	Harus membentuk dan menjamin sistem lisensi ekspor dan impor yang efektif untuk transfer persenjataan internasional dengan persyaratan dokumen yang lengkap dan utuh
5.	Sertifikasi impor dan ekspor yang rinci	Harus berupaya untuk memperoleh sertifikat impor dari negara penerima termasuk item-item yang diimpor, sedangkan negara yang menerima harus berusaha untuk menjamin bahwa lisensi dari otoritas yang disertifikasi dalam negara yang mengekspor mencantumkan senjata-senjata yang diimpor tersebut.
6.	Penegakan aturan hukum kepabeanan untuk impor-ekspor senjata	Harus memiliki pejabat-pejabat kepabeanan yang cukup terlatih untuk menegakkan aturan-aturan ekspor dan impor persenjataan.
7.	Regulasi ijin pemilikan senjata	Harus mendefinisikan, sesuai dengan regulasi dan aturan hukum nasional, senjata-senjata apa yang diijinkan untuk sipil dan yang dapat digunakan atau dimiliki oleh kekuatan militer dan polisi.
8.	Interpol	Harus mempertimbangkan dan menerapkan rekomendasi-rekomendasi yang relevan dari Interpol.

Sumber: Andi Widjajanto & Makmur Keliat, 2005, *Laporan Penelitian: Penggunaan Fasilitas Kredit Ekspor untuk Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia (2000-2004)*, Jakarta, Pacivis-FISIP UI. Pp. 45-46.

Kemudian pada tataran internasional negara-negara anggota PBB diminta untuk merancang seluruh persetujuan dan kerangka kesepakatan transfer persenjataan, berikut kewajiban tersebut:

1. Kerjasama untuk mencegah pengalihan;
2. Penerbitan sertifikat penggunaan akhir dan pemakai akhir yang dapat diverifikasi;
3. Kerjasama kepabeanan dan intelijen untuk mendeteksi perdagangan gelap senjata;
4. Kerjasama hukum criminal untuk mengembangkan prosedur baku untuk mengatur ekspor dan impor senjata;
5. Pengaturan terhadap agen perantara pemasok senjata;
6. Ketaatan terhadap sanksi dan embargo senjata yang dikeluarkan oleh *UN Security Council*;
7. Pelaporan transaksi transfer senjata keada *UN Register of Convention Arms*.

Dari berbagai regulasi yang ada, pihak yang diuntungkan tentu negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem internasional. Terlebih lagi lima negara yang menempati posisi teratas eksportir senjata internasional merupakan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tentunya hal ini menjadi suatu keuntungan, ditambah lagi dengan adanya hak veto yang dimiliki negara-negara tersebut. Transaksi persenjataan global dan pengembangan industri pertahanan pada suatu negara dapat dikontrol dan dibatasi, sehingga negara-negara tersebut mendominasi tatanan industri pertahanan global. Semakin sulit rasanya bagi negara-negara lain, terutama negara berkembang yang berusaha mengembangkan industri pertahanan nasionalnya untuk mendobrak

dominasi tersebut. Selain itu, negara-negara tersebut tentu memiliki tendensi dalam menjalin kerjasama industri pertahanan dengan negara lain, dimana negara yang tergabung dalam sebuah aliansi akan lebih mudah mendapatkan akses dalam mengembangkan industri pertahanan nasionalnya dibandingkan negara yang tidak berada dalam sebuah pakta pertahanan.

Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan negara-negara lain untuk terus meningkatkan kapabilitasnya hingga mencapai kemandirian di bidang pertahanan. Fenomena ini pun dirasakan Indonesia dan Korea Selatan, sehingga kedua negara pun memiliki *concern* guna mewujudkan industri pertahanan nasional yang berdaya saing global. Korea Selatan dalam hal ini tentu lebih unggul dari Indonesia dalam bidang industri pertahanan dengan adanya kedekatan dengan Amerika Serikat, sehingga memiliki akses lebih dalam kerjasama guna mengembangkan industri pertahanan. Berikut merupakan perkembangan industri pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan kedua negara.

#### **4.1.1. Industri Pertahanan Indonesia**

Keberadaan industri pertahanan di Indonesia sudah dimulai sejak masa kolonialisme Belanda, tepatnya pada 1808 saat Gubernur Jenderal Belanda yang berkuasa saat itu, William Herman Daendels mendirikan bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat perkakas Belanda yang dinamakan *Contructie Winkel* (CW) di Surabaya. Perusahaan ini kemudian direlokasi pada 1918

hingga 1920 ke wilayah Bandung yang dianggap lebih aman dengan kontur wilayah yang dikelilingi perbukitan. Sama seperti PT. Pindad sebagai cikal bakal industri pertahanan di Indonesia, kehadiran industri yang fokus pada penanganan sektor maritim bermula saat Indonesia belum merdeka. Keberadaan industri pertahanan yang memiliki fokus pada sektor maritim pun tidak lepas dari andil Belanda. Industri strategis yang dikenal sebagai PT. PAL ini diawali dari sebuah galangan kapal yang dibentuk Belanda pada tahun 1939 dengan nama *Marine Establishment* di Surabaya. Ketika masa pendudukan Jepang, industri ini tetap menjadi ujung tombak dalam menyediakan kebutuhan di sektor maritime (<https://www.pal.co.id>).

Kepemilikan industri pertahanan Indonesia tercapai setelah disepakatinya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada 12 Desember 1949 yang salah satu hasilnya ialah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Berdasarkan hasil ini, maka secara langsung aset yang berada di Indonesia menjadi milik Indonesia, salah satu manifestasinya ialah perusahaan yang kini bernama Pindad tersebut (<https://www.pindad.com>). Keberadaan industri pertahanan saat itu lebih cenderung pada *land system* (matra darat) dan terfokus pada pemeliharaan alutsista. Tentu hal ini tidak aneh, mengingat Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) lebih mendominasi dibandingkan matra lainnya Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) kala itu.

Pada dekade awal kemerdekaan, kondisi pertahanan Indonesia bisa dikatakan merupakan yang terbaik di wilayah Asia Tenggara, bahkan di belahan bumi selatan. (*Angkasa* No.7, 2011: 14-17). Kekuatan pertahanan Indonesia ditakuti oleh negara tetangga maupun kawasan karena memiliki alat pemukul yang kuat serta *deterrent effect* yang mampu menggetarkan pihak yang berusaha mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional kala itu. Sektor udara menjadi salah satu yang diperhitungkan dalam hal ini, dengan kepemilikan pesawat tempur hasil rampasan perang dari pihak Jepang. Ditambah lagi dengan keberadaan pesawat baru dan canggih pada masa itu seperti P-51 *Mustang* C-47 *Dakota* yang semakin menunjang kapabilitas pertahanan Indonesia. Hingga dekade 60-an, Indonesia masih menjadi negara dengan kekuatan pertahanan yang kuat di kawasan dengan hadirnya pesawat tempur baru nan canggih seperti Mig-15, Mig-17, Mig-21 dan TU-16. Namun, kondisi tersebut tidak dibarengi dengan kapabilitas industri pertahanan nasional yang mumpuni untuk menjaga kualitas pertahanan Indonesia (Madian, 2012: 79).

Hingga terjadinya peristiwa pergantian rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru, industri pertahanan nasional belum menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan *indigenous arms*. Kekuatan pertahanan Indonesia saat itu sangat didominasi oleh produk luar negeri, terutama Uni Soviet dan Amerika Serikat. Produk pertahanan luar negeri tersebut



menimbulkan efek dependensi yang luar biasa terhadap negara mitra utama penopang kebutuhan alutsista Indonesia, terutama alutsista di sektor udara. Kemudian, untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kapabilitas sektor dirgantara, Soeharto meresmikan PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio pada Agustus 1976 dengan Dr. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Direktur. PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio yang kemudian berganti nama menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) pada Oktober 1985. ([www.indonesian-aerospace.com](http://www.indonesian-aerospace.com)).

Usaha untuk mendorong peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional berlanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 yang berisi tentang pembentukan Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan (TPIH). TPIH bertugas untuk, *pertama* membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah guna pengembangan industri Hankam secara terpadu, efektif dan efisien. *Kedua*, menyiapkan rencana dan langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah, *ketiga* mengikuti perkembangan pelaksanaan program pengembangan industri Hankam. Dari hasil kerja TPIH hingga tahun 1990an, Indonesia memiliki industri yang masuk ke dalam kategori industri pertahanan yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), termasuk di dalamnya PT. PAL yang merupakan ujung tombak produksi alutsista matra laut, dan IPTN (sekarang PT.

Dirgantara Indonesia) sebagai poros industri avionik Indonesia. Namun, berbagai masalah pelik menghampiri Indonesia dalam upaya peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan. Berbagai hambatan muncul, seperti krisis finansial yang menimpa Asia pada 1997 yang menyebabkan terganggunya program pengembangan industri pertahanan nasional. Krisis ini menambah runyam persoalan Indonesia terkait kondisi pertahanan, dimana sebelumnya pada 1995, Indonesia yang kala itu dekat dengan negara-negara barat (Amerika Serikat & sebagian negara Eropa) dianggap bersalah dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur (sekarang Timor Leste). Akibatnya, negara-negara yang menjadi partner utama Indonesia itu pun menjatuhkan sanksi berupa embargo pertahanan ke Indonesia. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang menguntungkan bagi Indonesia, terlebih saat itu Indonesia sangat bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan angkatan bersenjata nasional. Oleh sebab itu, banyak alutsista yang mengalami penurunan guna, terutama alutsista matra udara karena sulitnya memperoleh komponen dan suku cadang alutsista yang memang mayoritas diproduksi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)).

Pada era milenium, terbitlah Buku Putih Pertahanan Indonesia (*Indonesia Defence White Paper*) yang memuat

diantaranya kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan dan kerjasama internasional di bidang pertahanan. Buku Putih Pertahanan Indonesia (BPPI) pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 saat Departemen Pertahanan (saat ini Kementerian Pertahanan) berada di bawah kepemimpinan Matori Abdul Djilil. Penerbitan buku ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kehadiran BPPI tentu juga menghadirkan harapan baru terkait program peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional.

BPPI 2003 menjelaskan bahwa pembangunan nasional di bidang sumber daya buatan diarahkan untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, maka diperlukan kolaborasi antar *stakeholder* yang berkaitan dengan bidang industri pertahanan. Melalui program ini, Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta lembaga-lembaga lain harus menjalin kerjasama yang memiliki nilai strategis. Hal ini dinilai dapat mendorong percepatan menuju kemandirian nasional di bidang teknologi pertahanan, termasuk diantaranya memberikan ruang bagi sektor lain untuk terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kerjasama ini diwujudkan melalui pengintegrasian kemitraan tiga pelaku utama, yaitu Industri, Perguruan Tinggi dan Industri Pertahanan sebagai pengguna (BPPI,

2003: 100). Tercantum lima sasaran yang dikembangkan melalui kerjasama tersebut, antara lain ialah:

- a. Kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, informatika dan industri nasional lainnya.
- b. Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan pengembangan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi.
- c. Memberdayakan industri nasional dalam rangka menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.
- d. Kerjasama pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan lainnya.
- e. Kerjasama Penelitian dan Pengembangan pertahanan dikembangkan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan, baik yang berkaitan dengan teknologi, manajemen maupun sumber daya manusia.

Melalui BPPI 2003, kerangka arah percepatan pengembangan industri pertahanan nasional semakin jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat program dan sasaran yang mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Kerangka selanjutnya kemudian dimunculkan seiring dengan diterbitkannya BPPI kedua tahun 2008. Dalam BPPI 2008, pengembangan industri pertahanan semakin mendapatkan

perhatian, dimana semakin tingginya kesadaran akan bahaya ketergantungan terhadap produk luar negeri yang sangat rentan terhadap faktor politik yang bisa berdampak embargo. Upaya pengembangan industri pertahanan yang tertuang dalam BPPI 2008 dengan memunculkan konsep pengembangan industri pertahanan yang melibatkan pihak pengguna (Dephan dan TNI), pihak yang memproduksi, perancang, penguji, perancang yang kompeten, serta perencana yang tepat dalam kerangka konsep Tiga Pilar Pelaku Industri Pertahanan. Konsep ini mengisyaratkan bahwa adanya kelanjutan dari konsep yang sebelumnya tertuang di BPPI 2003. Kemudian, di BPPI edisi ini pula diterangkan bagaimana keterlibatan pihak asing dalam pengembangan industri pertahanan nasional. Kerjasama dengan negara lain akan diwujudkan dalam bidang riset dan pengembangan teknologi pengayaan sumber-sumber energi, bahan metal dan semikonduktor serta propelan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (BPPI, 2008: 161).

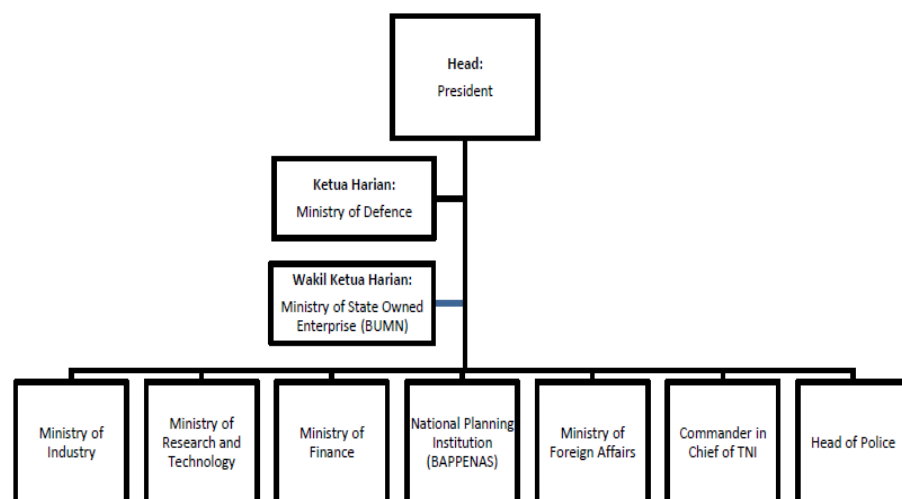
Selain hal-hal tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi perkembangan industri pertahanan yaitu jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertahanan secara umum. Kebijakan nominal anggaran pertahanan Indonesia ditentukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan seperti doktrin pertahanan, kondisi geografis dan kepentingan strategis yang ingin dilindungi yang sebelumnya telah diperkirakan dalam perumusan strategi pertahanan. Di

Indonesia, anggaran pertahanan kemudian diserap dan digolongkan menjadi tiga komponen yaitu untuk pengadaan, personil serta operasional dan perawatan. Kebijakan penyerapan anggaran pertahanan saat ini masih dirasa jauh dari cukup untuk mendorong percepatan kemandirian industri pertahanan nasional secara maksimal. Prioritas dalam penyerapan anggaran ialah kesejahteraan personel dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas personel yang dialokasikan sebesar 67%, sedangkan pembangunan pertahanan mendapat alokasi dana sebesar 33% (BPPI, 2008: 164).

Lebih lanjut, peran penting industri pertahanan dalam menopang kekuatan negara semakin dirasa perlu ditingkatkan urgensitasnya dengan mengeluarkan kebijakan yang mengarah pada percepatan menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Tahun 2012 menjadi salah satu momentum dalam upaya tersebut, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengeluarkan produk hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut, terdapat pasal yang melindungi eksistensi industri pertahanan nasional, dimana pengguna yaitu TNI, POLRI dan Kementerian dan/ atau lembaga pemerintah Non-Kementerian wajib menggunakan alpalhankam yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri, sehingga hal ini dapat mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan nasional.

Dalam UU ini juga diputuskan mengenai pembentukan Badan khusus yang menangani industri pertahanan nasional yang disebut Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP bertugas untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu mendorong percepatan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Adapun struktur KKIP diisi oleh Presiden Republik Indonesia sebagai ketua, serta Kementerian dan Lembaga yang berposisi sebagai anggota. Keberadaan KKIP merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri, yang juga dalam hal ini berkaitan dengan target untuk mencapai *Minimum Essential Force* (MEF) yang ditargetkan terpenuhi pada 2024.

**Gambar 4.2. Struktur Komite Kebijakan Industri Pertahanan**



**Sumber: Diolah oleh Penulis**

Dengan bentuk struktur KKIP yang melibatkan banyak pihak utama dalam keberlangsungan industri pertahanan nasional, tentu keberadaan KKIP diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam perumusan arah industri pertahanan nasional ke depannya. Seluruh kebijakan guna meningkatkan kapabilitas pertahanan harus diarahkan sesuai kebutuhan untuk menjawab segala bentuk tantangan, ancaman serta permasalahan yang mungkin terjadi. Pengembangan industri pertahanan sebagai salah satu tiang pembentuk *power* negara tentunya harus disesuaikan dengan kondisi geografis, perkembangan teknologi dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan potensi industri pertahanan nasional dicetuskanlah sebuah konsep pengembangan yaitu konsep *triple helix*. Konsep ini merupakan rancangan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional dengan melibatkan tiga aktor utama, yaitu pembuat regulasi, pengguna dan produsen.

**Gambar 4.3. Tiga Pilar Industri Pertahanan Indonesia**



*Sumber: BPPI 2008*



Ketiga pilar utama ini harus bahu-membahu demi terwujudnya kemandirian industri pertahanan Indonesia. Industri pertahanan tidak dapat hidup apabila produk yang dibuat tidak diserap oleh konsumen. Sehingga diperlukan peran pemerintah dalam mengatur arus permintaan dan penjualan produksi dari industri pertahanan nasional. Namun, yang selama ini menjadi tantangan ialah produk pertahanan yang dihasilkan industri pertahanan nasional belum mampu memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh angkatan bersenjata nasional sebagai pengguna utama. Sehingga, pelibatan Perguruan Tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya untuk meningkatkan kualitas produk yang tentu harus menyesuaikan kebutuhan dalam negeri. Apabila ketiga aktor ini mampu berkolaborasi dengan ciamik, tentu bukan hal yang mustahil melihat kemandirian industri pertahanan Indonesia. Hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa industri pertahanan nasional masih harus berjibaku untuk menjaga eksistensinya. Hal ini tentu mempengaruhi fokus industri, dimana masih condong dalam memproduksi produk yang bersifat komersil dibandingkan dengan produk pertahanan (Alamie, wawancara 15 Agustus 2018), seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Alutsista Indonesia

	Alutsista	
	Alutsista yang dimiliki	Alutsista Produksi Nasional
<b>Darat</b>	-MBT, 49 Leopard 2A4; 8 Leopard 2RI -AUV, 14 APR-1; 3 Bushmaster; 22 Comando Ranger -Anti Tank/ Anti Infrastructure, SS.11; Milan; 9K11 Malyutka (AT-3 Sagger)	-weapons; rifles, sniper rifles, machine guns, sub machine guns, shot guns, grenade launcher, mortar. -Medium Tank -ammunition -4x4 Komodo and 6x6 Anoa
<b>Laut</b>	-12 Frigates -84 Patrol and Coastal Combatants, 5 Submarines -5 Principal Amphibious Vessels -55 Landing Craft -23 Logistic and Support	-Landing Platform Dock 125m Ships -Frigates -Patrol ships
<b>Udara</b>	-Aircraft, 8 F-5E Tiger II; 4 F-5F Tiger II; 7 F-16A Fighting Falcon; 3 F-16B Fighting Falcon -9 F-16C Fighting Falcon; 4 F-16D Fighting Falcon; 2 Su-27SK Flanker; 3 Su-27SKM Flanker; 2 Su-30MK Flanker; 9 Su-30MK2 -18: 9 AS332 Super Puma (NAS332L) (VIP/CSAR); 1 SA330SM Puma (NAS330SM)	-Multirole Transports; CN295, CN235. -Helicopters

*Sumber: Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber<sup>4</sup>*

Dari tabel yang disajikan di atas, tiga industri utama sudah mampu menghasilkan produk yang tidak hanya digunakan di dalam negeri tetapi juga sudah mampu merambah pasar internasional. Meskipun produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan nasional masih berbasis transportasi, dan cenderung memiliki spesifikasi bertahan. Namun, juga perlu diapresiasi alutsista yang dihasilkan

<sup>4</sup> Lihat di Military Balance 2017, <https://www.pindad.com>, <https://www.pal.co.id>, dan di <https://www.indonesian-aerospace.com>

produsen dalam negeri ini. Dengan diterapkannya sistem imbal dagang, kandungan lokal dan ofset dalam pengembangan yang melibatkan pihak asing, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di dalam negeri (BPPI, 2015: 67).

Namun, perlu diapresiasi bahwa beberapa alutsista yang dimiliki Indonesia merupakan hasil kerjasama dengan negara lain. Misalnya Medium Tank yang merupakan hasil kerjasama *Co-development* dengan Turki. Kemudian ada helikopter Super Puma yang merupakan hasil kesepakatan lisensi dengan Inggris. Oleh sebab itu, tentu hal ini mengindikasikan keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan kapabilitas industri pertahanan nasional.

#### **4.1.2. Industri Pertahanan Korea Selatan**

Dewasa ini, Korea Selatan dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang berhasil mengembangkan kapabilitas industri pertahanan nasional melalui berbagai kebijakan yang di dalamnya juga melibatkan pihak asing untuk memenuhi kekurangannya, terutama dalam bidang teknologi. Namun, jauh sebelum Korea Selatan mampu memproduksi *indigenous arms*, Korea Selatan pun harus melewati masa sulit dalam usaha pemenuhan kebutuhan pertahanannya di masa lampau. Jauh mundur ke belakang, terutama di periode waktu sebelum 1970, Korea Selatan sangat menggantungkan pasokan kebutuhan pertahannya kepada sekutu utama yaitu Amerika Serikat.

Kedekatan Korea Selatan dengan Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan ideologi antara Pyongyang dan Seoul, dimana Amerika Serikat bersama Uni Soviet merupakan aktor utama yang menjadi penyebab perbedaan tersebut. Korea Selatan yang sebelum merdeka memang sudah mendapat dukungan dari Amerika Serikat (sebagai sesama negara yang menganut paham liberal) melanjutkan keharmonisan keduanya, bahkan kedekatan ini terus berlanjut meskipun terjadi pergantian rezim kepemimpinan di Amerika Serikat. Akan tetapi, ketika Amerika berada di bawah kendali Presiden Nixon, terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan tingkat dukungan Amerika Serikat ke Korea Selatan mengalami penurunan, terutama dalam bidang pertahanan. Akibat dikeluarkannya kebijakan “*the Guam Doctrine*” pada 1969 yang juga dikenal sebagai “*an Asian defence by Asians*” tidak hanya pada Korea Selatan sebagai negara Asia yang dekat dengan Amerika Serikat, bahkan fenomena ini juga dirasakan oleh seluruh negara di Asia (Moon & Lee, 2008: 117).

Pergantian kebijakan di akhir 60-an ini membuat Pemerintah Korea Selatan mulai memeras otak untuk mendorong percepatan kemandirian industri pertahanan nasionalnya. Pemerintah Republik Korea Selatan mulai merancang program yang mendukung terwujudnya produksi *indigenous arms* pada awal dekade 70-an. Dukungan ini diwujudkan dengan dikeluarkannya tiga kebijakan oleh Pemerintah Korea Selatan, *pertama* yaitu dengan disahkannya

Undang-Undang tentang Industri Pertahanan pada 1973. *Kedua*, dikeluarkannya *Force Improvement Plan* pada 1974 untuk membangun Angkatan Bersenjata Korea Selatan. *Ketiga*, pada 1975 disahkannya *Defense Tax Law* yang didesain untuk keuangan pengembangan industri nasional. Dukungan terhadap industri nasional ini juga berdasarkan dari *Government's general policy* selama 1970'an untuk menjaga investasi pada sektor *shipbuilding*, *steel* dan *electronics industries*. Perkembangan dari ketiga sektor inilah yang kemudiann menjadi embrio untuk memproduksi alpalhankan sendiri, seperti kapal dan alat berat ([www.GlobalSecurity.org](http://www.GlobalSecurity.org)).

Selain ketiga kebijakan tersebut, Pemerintah Republik Korea juga membentuk Defence Procurement Agency (DPA), yaitu sebuah Badan yang fokus dalam menangani pengadaan kebutuhan pertahanan nasional yang diresmikan pada 1971. Badan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Korea Selatan ini bertanggung jawab atas 95% dari seluruh kegiatan pengadaan alat pertahanan di Korea Selatan. DPA memegang kendali semua hal, mulai dari proses awal penentuan spesifikasi senjata, pembayaran (keuangan), hingga urusan terkait kontraktor yang diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyer yang mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Secara khusus, DPA memiliki fungsi utama yang mencakup pengadaan alat-alat pertahanan untuk kebutuhan angkatan bersenjata Korea Selatan,

pembangunan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan militer, manajemen sumber persediaan, manajemen informasi harga dan biaya, negosiasi sistem *offset*, manajemen spesifikasi dan standar militer ([www.GlobalSecurity.org](http://www.GlobalSecurity.org)).

Dari berbagai fungsi yang dimiliki DPA, *offset* merupakan salah satu sistem yang menjadi fokus DPA dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

*“offset in arms trade are arrangements of industrial or commercial compensation practices required as a condition of foreign military purchases, which are expected to be used to serve the buyer’s economic, industrial, and technological development.”* (Han & Park, 2004: 1).

Seperti kebanyakan negara (setidaknya lebih dari 130 negara) yang mencoba meningkatkan kapabilitas industri pertahanannya melalui kerjasama dengan pihak asing, Korea Selatan pun menjadikan *offset* sebagai salah satu cara untuk menutupi kekurangan Korea dalam tingkat penguasaan teknologi kala itu (Martin, 1996: 3-5). Strategi ini digunakan dengan tujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Program *offset* ini dimanfaatkan untuk mendukung produk yang dihasilkan industri pertahanan dalam negeri Korea Selatan (*repair operations*), mengekspor produk pertahanan ke negara mitra dan memfasilitasi transfer teknologi dari luar negeri. Selain itu, hal ini diharapkan mampu memangkas pengeluaran Korea untuk mendapatkan barang yang teknologinya belum dimiliki

/ belum mampu dikuasai industri pertahanan Korea. Sistem ini pun sudah menjadi “*a way of life*” dalam pasar senjata internasional.

Korea Selatan mulai menerapkan sistem *offset* pada tahun 1983, program ini telah mencapai nilai sebesar USD 4,5 milyar hingga Mei 2002, atau dengan rata-rata USD 230 juta tiap tahunnya (Han & Park, 2004: 1). Berkat program ini, industri pertahanan Korea Selatan telah menerima USD 1,1 milyar yang diwujudkan dengan ekspor produk industri dalam negeri. Nilai tersebut dihasilkan dari penerapan program *offset* dengan setidaknya enambelas negara, dimana Amerika Serikat mendominasi dengan 67% dari total pembelian yang dilakukan dengan Korea Selatan. Berada di bawah Amerika Serikat, ada Inggris dengan 11%, Jerman dan Perancis masing-masing 7% dan Italia dengan angka mencapai 3%. Lebih jauh, Korea Selatan menempatkan transfer teknologi dan pelatihan yang terkait teknologi sebagai prioritas utama yang berusaha melalui program *offset*. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menitik beratkan pada transfer teknologi pada setiap pembelian yang dilakukan, dengan rasionalisasi bahwa secara umum transfer teknologi menghasilkan *manufacturing skills* dan *technical assistance* yang sangat berguna dalam meningkatkan kapabilitas industri dalam negeri, yang tentunya akan mempercepat kemandirian Korea Selatan.

Kebutuhan akan kemandirian industri pertahanan dalam negeri juga didorong akibat keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Korea Selatan yang menjadi suatu yang harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga keterbatasan ini tidak akan terlalu banyak mempengaruhi kekuatan pertahanan. Melalui *Defense Reform Plan*, Pemerintah Korea Selatan berusaha melakukan transformasi pada tubuh angkatan bersenjata yaitu dari *a-manpower intensive* ke *a-intensive technology military organization* (Korkmaz & Rydqvist, 2012: 62). Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertahanan Republik Korea akan melakukan berbagai macam program dengan total mencapai 293 *force improvement projects*. Proyek ini tidak hanya melibatkan pembelian dari pihak asing, namun juga melibatkan pembelian produk dalam negeri serta pengembangan dan pembaruan industri pertahanan nasional. Meskipun Pemerintah menyadari sulitnya dalam menilai karakteristik setiap proyek, namun kemudian melalui *Force Improvement Programme* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (Korean Defence White Paper, 2010: 146):

1. Meningkatkan kapabilitas *intelligence, surveillance reconnaissance* (ISR);
2. Peningkatan kapabilitas *command, control, communications, computers and intelligence* (C4I) dalam berbagai pemahaman militer (*military command*),
3. Peningkatan kapabilitas berbagai bentuk alat tempur.



Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan menghasilkan berbagai alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan nasional Korea Selatan, berikut merupakan produk dari industri pertahanan nasional Korea Selatan.

**Tabel 4.4. Produk Industri Pertahanan Korea Selatan**

<i>Land System</i>	<i>Aerospace System</i>	<i>Maritime System</i>
-K-9 Howitzer -K-2 MBT -Combat armored and tactical vehicles -Air defense weapons and missiles -Various firearms and ammunition	-T-50 and KT-1 Trainer -FA-50 Combat Aircraft -Helicopters -UAVS and MRO	-Aegis Destroyers -Frigates -Combat support ships -Diesel-engine submarines -Ship to ship missiles and torpedos -Tactical radios, radars and combat optics for electronics and communications systems

*Sumber: www.kdia.or.kr*

Produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri Korea Selatan merupakan gambaran dari konsistensi Pemerintah dalam mendorong percepatan kemandirian industri pertahanan. Dari berbagai alutsista yang dimiliki Korea Selatan, beberapa merupakan hasil pengembangan dengan negara lain, seperti kapal selam jenis *Changbogo-209* yang merupakan hasil kerjasama dengan Jerman, dan Korean Jet-Fighter yang merupakan hasil adopsi dari *F-16 Falcon* Amerika Serikat. Produk ini pun menunjukkan keberhasilan Korea Selatan dalam berkolaborasi dengan pihak asing, mulai dari

sistem pengadaan/ pembelian hingga ke tingkat pengembangan alutsista bersama. Tentu hasil yang dicapai Korea ini tidak diraih dengan proses yang instan, melainkan melewati berbagai dinamikan di berbagai sektor. Komitmen seluruh pihak yang terkait dengan pengembangan industri pertahanan menjadi kunci utama penncapaian Korea Selatan.

#### **4.2. Kerjasama Indonesia – Korea Selatan**

Kepentingan nasional sebuah negara merupakan sesuatu yang sensitif dan memliki skala prioritas tinggi yang tidak bisa diganggu gugat oleh faktor apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjaga kedaulatan negara yang merupakan kepentingan nasional negara, tentu dibutuhkan berbagai kebijakan yang berjalan searah dengan kepentingan tersebut. Usaha untuk mewujudkan kepentingan nasional juga melibatkan berbagai macam aktor, baik *state actor* maupun *non-state actor*. Perwujudan keterlibatan aktor-aktor tersebut tercurah dalam suatu kerangka kerjasama yang tentu menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Kerjasama internasional merupakan perwujudan dari kebijakan luar negeri yang berfungsi sebagai salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya antar bangsa. Selain itu, kerjasama internasional juga bertujuan untuk mencegah konflik antar pihak, serta merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan dan mencari solusi atas masalah yang

melibatkan lebih dari satu negara, sehingga tidak berkembang dan mengerucut menjadi sebuah konflik. Indonesia dan Korea Selatan pun merupakan bentuk konkrit dari negara yang terikat dalam suatu kerangka kerjasama internasional. Kerjasama kedua negara pun sudah menyentuh ke ranah strategis, dimana terdapat beberapa proyek strategis yang menjadi bagian dari harmonisnya hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Namun, kedekatan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melewati tahapan-tahapan sehingga berhasil meyakinkan satu sama lain untuk meningkatkan intensitas kerjasama hingga ke arah yang lebih *advance*. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan mampu melewati dinamika politik yang menerpa masing-masing, misalnya pergantian rezim kepemimpinan maupun pergeseran sistem politik internasional.

#### **a. Orde Lama**

Pada masa kepemimpinan Soekarno, intensitas hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan tidak terlalu mencolok, sehingga tidak banyak artikel atau pernyataan resmi maupun ilmiah yang menggambarkan interaksi antar kedua negara. Tercatat secara resmi keterangan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, bahwa terdapat interaksi yang dilakukan Korea Selatan terkait Indonesia. Pada Desember 1949, Korea Selatan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan pengakuan atas keberadaan Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaut. Namun, hubungan keduanya kala itu termasuk

lemah dikarenakan adanya perbedaan pandangan politik ketika terjadi perang dingin. Korea yang terbagi dua, dimana Pyongyang dekat dengan Uni Soviet yang beraliran Komunis, sedangkan Seoul di selatan dekat dengan Amerika Serikat yang berfaham liberal.

Indonesia yang berdasarkan konstitusi dasar menganut faham politik bebas aktif yang tidak memihak pada blok Amerika Serikat maupun blok Uni Soviet, seolah tidak ingin berada dalam keruhnya hubungan antara Soviet dan Amerika Serikat. Meskipun demikian, Indonesia di rezim Soekarno memang terlihat condong dekat ke Soviet, terbukti dengan tingginya intensitas hubungan antara Indonesia dan Soviet, mulai dari penyaluran senjata hingga bantuan pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur. Merujuk pada keadaan itu, tentu sulit rasanya meningkatkan intensitas antara Indonesia dan Korea Selatan yang memiliki pandangan berbeda terhadap sistem politik internasional saat itu. Terlebih untuk kerjasama di bidang pertahanan yang tentu sangat sensitif, tentu kedekatan dengan negara yang dianggap berseberangan merupakan sesuatu yang *impossible* kala itu.

#### **b. Orde Baru**

Peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966 tentu mempengaruhi pandangan dan kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga hal ini pun mempengaruhi kondisi kawasan bahkan regional. Kebijakan tersebut terlihat pada

perubahan arah hubungan Indonesia dengan negara lain, yang awalnya condong dekat dengan Soviet (Blok Timur) beralih ke Amerika (Blok Barat). Tentu hal ini berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pertahanan dan pengembangan industri pertahanan nasional, dimana Amerika mulai mengisi kebutuhan pertahanan Indonesia.

Pergantian rezim ini pun menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Beberapa peristiwa tersebut kemudian didukung dengan adanya persamaan pada sistem perpolitikan kedua negara, yang mana pada tahun 1960-an hingga 1970-an perwira-perwira militer mulai memegang tampuk kekuasaan sehingga hal ini mempermudah jalinanan hubungan antara Indonesia – Korea Selatan. Secara resmi Indonesia dan Korea Selatan mulai mengirimkan utusan masing-masing setelah terjadinya kesepakatan perundingan di tingkat konsuler pada Agustus 1966. Kemudian, kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan dibukanya Konsulat Jenderal Korea Selatan di Jakarta pada Desember 1966, lalu disusul dengan pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Seoul pada Mei 1968. Terjalannya hubungan di tingkat konsuler dan penempatan utusan ini menjadi pelecut untuk meningkatkan intensitas antara kedua negara, dimana sejak hubungan konsuler terbentuk para pemimpin di bidang politik, ekonomi dan budaya mulai mengadakan kunjungan secara intensif. Sehingga, akibat dari intensitas yang

baik, hubungan konsuler pun meningkat dan berubah menjadi hubungan diplomatik penuh atau hubungan diplomatik tingkat Duta Besar terhitung sejak September 1973 (<http://overseas.mofa.go.kr/id>).

Hubungan yang berkaitan dengan bidang keamanan mulai terbentuk tidak lama setelah hubungan diplomatik penuh terjalin. Hal ini diwujudkan dengan saling menempatkan atase militer masing-masing negara, yang mana Korea Selatan menempatkan seorang pejabat atase militer di Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta pada tahun 1974, kemudian disusul dengan pemempatan atase militer Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul lima tahun setelahnya. Penempatan Duta Besar Indonesia di Seoul yang berlatar belakang menjadikan hubungan di bidang keamanan semakin kuat sehingga mempermudah untuk dilanjutkan kearah kerjasama di bidang militer seperti pertukaran program Sekolah Staf dan Komando (Sesko), penyelenggaraan seminar-seminar militer bersama serta kerjasama pengadaan sarana dan prasarana militer.

Sebelum terbentuknya hubungan di bidang keamanan, Indonesia dan Korea Selatan terlebih dahulu menjalin hubungan yang ditujukan untuk membangun prinsip-prinsip kerjasama di bidang ekonomi. Tahun 1996, ketika pertama kali Korea Selatan mulai menysar Asia Tenggara sebagai pasar investasi modal, Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang merasakan

suntikan modal dari Korea Selatan, melalui kerjasama yang dilakukan Nam-Bang Development Cooperation dengan perusahaan perikanan dan perhutanan lokal di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk keseriusan Korea Selatan dalam menjalin keterikatan di sektor ekonomi dengan Indonesia setelah dibukanya pintu bagi investor asing oleh Soeharto pada 1967. Pada 1971 terjadi penandatanganan yang menyepakati mengenai kerjasama perdagangan dan teknologi antara kedua negara. Kemudian, Sejak 1980'an, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan semakin memiliki tingkat dependensi yang terus menanjak, dimana Korea Selatan yang kurang dalam kepemilikan sumber daya alam serta daya serap pasar yang terbatas, memandang Indonesia sebagai mitra yang mampu membantu untuk menutupi kekurangan tersebut, tentunya dengan timbal balik berupa suntikan investasi modal dan alih teknologi bagi Indonesia. Selain itu, Korea juga menjadi salah satu negara yang memiliki komitmen untuk memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan perekonomian Indonesia. Bantuan hibah Korea Selatan disalurkan melalui sebuah badan yang bernama Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sejak berdirinya KOICA pada 1991, terhitung Korea Selatan telah berkontribusi sebesar 105 juta US Dollar hingga tahun 2010 untuk bekerja sama dalam pembangunan perekonomian Indonesia (<http://overseas.mofa.go.kr/id>).

### c. Era Reformasi

Peristiwa besar yang dialami Indonesia pada 1997 hingga puncaknya pada Mei 1998, menjadi suatu catatan penting dalam peralihan sistem yang dianut Indonesia. Rezim orde baru yang terkenal dengan sifat tertutup, otoriter dan koruptif lengser dan digantikan dengan rezim yang lebih demokratis yang dianggap lebih mampu mengakomodir seluruh elemen bangsa Indonesia. Peristiwa peralihan dari era orde lama ke era reformasi tentu juga berakibat pada perkembangan industri pertahanan nasional. Krisis yang menerpa Indonesia menjadikan program pengembangan industri pertahanan nasional terhambat dan mangkrak. Tetapi, pergantian rezim ini juga menjadi pertanda baru bagi peningkatan hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan, terutama di bidang pertahanan yang semakin kuat.

Kerjasama di bidang pertahanan yang dijalin antara Indonesia dan Korea Selatan pasca peristiwa reformasi diawali pada tahun 1999. Perjanjian ini berisikan pengaturan pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Korea tentang penerimaan bersama jaminan mutu antar pemerintah untuk materiil dan jasa pertahanan (*Arrangement Between the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea Concerning on Mutual Acceptance of Government Quality Assurance of Defense Materiel and*



*Services*). Kemudian satu tahun setelah perjanjian ini, Indonesia dan Korea Selatan melalui Menteri Pertahanan masing-masing menandatangani *Letter of Intent for Specific Defense Industry Cooperation*. Perjanjian ini mencakup lima poin kesepakatan, diantaranya ialah Program Imbal Beli antara Republik Indonesia dan Republik Korea, Pesawat Latih Dasar KT-1, Kerjasama di bidang Pembuatan Kapal, Program Pemeliharaan Mesin Pesawat Terbang, Kerjasama di bidang Amunisi.

Kesepakatan yang tercapai kala itu jelas mengindikasikan semakin harmonisnya hubungan Indonesia dan Korea Selatan di awal era reformasi. Hal ini pun kemudian membawa pengaruh yang positif bagi perkembangan hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ke ranah yang lebih kompleks.

Lebih jauh lagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun menyepakati *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea in the 21<sup>st</sup> Century* pada Desember 2006. Perjanjian ini berisikan tiga bidang kerjasama yang menjadi fokus kedua negara, yaitu kerjasama di bidang politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, serta kerjasama di bidang sosial budaya (<https://www.kemlu.go.id>). Kerangka baru yang disepakati kedua negara menjadi tanda pentingnya Korea Selatan bagi Indonesia begitupun sebaliknya. *Strategic partnership* ini pun

menjadi babak baru bagi hubungan Indonesia dan Korea Selatan ke depannya, terutama peningkatan pada sektor investasi Korea Selatan ke Indonesia.

**Tabel 4.5. Nilai Investasi Korea Selatan ke Indonesia 2008-2015.**

(Juta USD, berdasarkan laporan)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai	301.1	624.5	328.5	1,218.7	1,949.4	2,205.5	1,126.5	1,213
Proyek	186	335	332	456	421	807	1,336	2,329

*Sumber: Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia  
(<http://overseas.mofa.go.kr>)*

Keterlibatan Korea Selatan yang semakin besar dalam berbagai proyek di Indonesia menjadi gambaran betapa kuatnya hubungan kedua negara yang tentunya tidak hanya terfokus pada satu bidang kerjasama. Nilai investasi Korea Selatan di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mencapai puncaknya pada tahun 2013, meskipun ada penurunan pada tahun 2014, namun satu tahun setelahnya nilai investasi tersebut kembali mengalami kenaikan.

Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan dalam sistem pemerintahan yang dianut, dimana kedua negara menganut sistem demokrasi. Tentu ini menjadi kesamaan yang kemudian mempermudah dan memperlancar hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu menekankan bahwa Indonesia memandang Korea Selatan

sebagai sahabat dekat dan memiliki peran yang penting dalam di kawasan (Pointers Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam menerima Kunjungan Kepala Staf Angkatan Laut Korea Selatan, Jakarta 2 Juli 2018 pukul 11.30. WIB). Kedua negara pun terus berkolaborasi dalam mewujudkan kestabilan kawasan, misalnya Indonesia yang mengajukan diri sebagai mediator dalam proses damai yang diupayakan Korea Selatan dan Korea Utara. Kedekatan kedua negara pun ditunjukkan dengan tukar-menukar kunjungan antara pejabat kedua negara, mulai dari level Menteri hingga level Kepala Negara.

Tabel 4.6. Kunjungan Pejabat Tinggi Indonesia – Korea Selatan 2000-2017

No.	Bulan-Tahun	Keterangan
1.	Februari 2000	Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan.
2.	Oktober 2000	Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan ke Korea Selatan (ASEM).
3.	November 2000	Presiden Kim Dae-jung melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
4.	Maret 2002	Presiden Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan.
5.	Juli 2003	Menteri Luar Negeri Yoon Young-kwan melakukan kunjungan ke Indonesia (ASEM).
6.	Desember 2003	Utusan Khusus Presiden Nana Sutresna melakukan kunjungan ke Korea Selatan.
7.	Mei 2004	Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda melakukan kunjungan ke Korea Selatan.
8.	Januari 2005	Perdana Menteri Lee Hae-chan melakukan kunjungan ke Indonesia (Asia-Africa Summit Meeting).
9.	November 2005	KTT Korea Selatan – Indonesia (APEC, Busan).
10.	Februari 2006	Utusan Khusus Presiden Nana Sutresna melakukan kunjungan ke Korea Selatan.
11.	April 2006	Menteri Luar Negeri Ban Ki-moon melakukan kunjungan ke Indonesia.
12.	April 2006	Ketua DPR Agung Laksono melakukan kunjungan ke Korea Selatan.
13.	Desember 2006	Presiden Roh Moo-hyun melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia (Joint Declaration on Strategic Partnership between RI and ROK).
14.	Juli 2007	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan.
15.	Desember 2007	Sekjen PBB Ban Ki-moon melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
16.	Februari 2008	Wakil Presiden M. Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke Korea Selatan (Upacara pelantikan Presiden Lee Myung-bak).
17.	Juli 2008	KTT Korea Selatan – Indonesia (G-8)
18.	Januari 2009	Menteri Luar Negeri Yu Myung-han melakukan kunjungan ke Indonesia.
19.	Maret 2009	Presiden Lee Myung-bak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.
20.	Mei 2009	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan (Korea – ASEAN Commemorative Summit).

21.	Oktober 2010	KTT Korea Selatan – Indonesia (ASEAN + 3).
22.	November 2010	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan (KTT G-20).
23.	Desember 2010	Presiden Lee Myung-bak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia (Memimpin bersama Bali Democratic Forum bersama Presiden Indonesia).
24.	Juli 2011	Menteri Luar Negeri Kim Sung-hwan melakukan kunjungan ke Indonesia (ASEAN + 3, Korea – ASEAN, EAS, ARF Ministerial Meeting).
25.	November 2011	Presiden Lee Myung-bak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia (KTT ASEAN + 3, Korea – ASEAN, EAS).
26.	Maret 2012	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan (KTT Keamanan Nuklir Seoul 2012).
27.	November 2012	Presiden Lee Myung-bak melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia (Bali Democratic Forum).
28.	Februari 2013	Wakil Presiden Indonesia Boediono dan Ketua DPD Irman Gusman mengunjungi Korea Selatan untuk mengikuti acara pelantikan Presiden Park Geun-hye.
29.	Oktober 2013	Presiden Park Geun-hye melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia (APEC, Bali).
30.	Agustus 2014	Presiden Park Geun-hye memberikan selamat atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia melalui telepon.
31.	Oktober 2014	Menteri Luar Negeri Yun Byung-se melakukan kunjungan ke Indonesia.
32.	Oktober 2014	Utusan Khusus Presiden Kim Tae-hwan melakukan kunjungan ke Indonesia (Upacara pelantikan Presiden Joko Widodo)
33.	Desember 2012	Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan (Korea – ASEAN Commemorative Summit).
34.	Desember 2014	Ketua Parlemen Chung Ui-hwa melakukan kunjungan ke Indonesia.
35.	April 2015	Wakil Perdana Menteri Hwang Woo-yeo melakukan kunjungan kenegaraan (Koferensi Asia – Afrika).
36.	Agustus 2015	Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke Korea Selatan.
37.	Mei 2016	Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan.
38.	Mei 2017	Utusan Khusus Presiden Park Won-soon melakukan kunjungan ke Indonesia.
39.	November 2017	Presiden Moon Jae-in melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

(Sumber: Website resmi Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Republik Indonesia, <http://overseas.mofa.go.kr>)

Intensitas kunjungan yang dilakukan Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan kedekatan dan keharmonisan hubungan kedua negara meskipun terjadi pergantian rezim di masing-masing pihak. Hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang pertahanan semakin menunjukkan keakraban yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan dipercayakannya kerjasama dua dari tujuh program strategis pengembangan industri pertahanan Indonesia kepada Korea Selatan. Kedua program strategi tersebut ialah Kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur yang ditandai dengan disepakatinya *Letter of Intent on Co-Development of a Fighter Jet Project between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea* pada tahun 2009, serta kerjasama pembelian yang dibarengi dengan *co-production* pada bidang maritim yang fokus pada sektor kapal selam jenis *Chanbogo* pada tahun 2011 (<https://www.kemlu.go.id>).

Korea yang memiliki keunggulan dalam tingkat penguasaan teknologi memainkan peran yang penting dalam pengembangan industri pertahanan Indonesia. Sementara Korea Selatan memerlukan pasar yang lebih besar bagi produk industri pertahanannya, dan Indonesia menjadi negara yang membuka pasar bagi produk Korea. Hal ini tidak lepas dengan adanya pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan Korea merupakan hasil dari berbagai kerjasama dengan pihak asing. Keberhasilan industri maritim Korea Selatan dalam membangun kapal selam merupakan hasil dari

kerjasama dengan Jerman, sedangkan pesawat tempur merupakan hasil dari kerjasama dengan Amerika Serikat. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan adanya hubungan pengembangan di sektor strategis antara Indonesia dan Korea Selatan hingga kini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka penelitian yang berjudul Implementasi Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia-Korea Selatan periode 2013-2017 memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari bagian perjanjian, terdapat poin kesepakatan yang berpotensi sangat besar menjadi sebab tidak optimalnya kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Selain itu, poin tersebut mengindikasikan adanya keraguan kedua negara dalam kerjasama tersebut. Hal ini ditunjukkan pada poin ke-5 *Letter of Intent on Co-development of a Fighter Jet Project*, dimana poin tersebut menjelaskan adanya kesadaran kedua negara terhadap adanya kemungkinan penundaan dan pemberhentian kerjasama.
2. Implementasi kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan pada periode 2013-2017 sudah berjalan sebagian, namun tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan awal kerjasama. Pada bidang pesawat tempur berjalan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah



disusun. Kondisi ini dengan adanya penundaan selama dua tahun, yaitu 2013-2014. Penundaan ini dipengaruhi oleh variabel sosial politik yaitu adanya pergantian rezim kedua negara. Namun, penundaan ini lebih condong diakibatkan perubahan kepemimpinan yang terjadi di Korea Selatan. Akibat adanya hambatan ini, pada tahun 2013-2014 diadakan Pra-EMD Phase untuk menyerap dana yang telah dianggarkan. Sementara itu, implementasi kerjasama di bidang kapal selam berjalan lebih baik dibandingkan implementasi kerjasama di bidang pesawat tempur. Kerjasama di bidang kapal selam berjalan cukup baik meskipun mengalami sedikit kemunduran dari perencanaan yang telah ditentukan. Masalah ini terjadi pada pembangunan kapal selam ketiga dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyiapan galangan kapal PT. PAL Indonesia.

Secara menyeluruh, dalam kerjasama industri pertahanan antara Indonesia-Korea Selatan terjadi persebaran teknologi yang meliputi seluruh media yang diungkapkan oleh Mallik. Dalam bentuk kerjasama yang tertuang dalam pengadaan (*acquisition*), dalam penerapannya terjadi proses *transfer of technology* yang diwujudkan dalam kegiatan *co-production* pada kapal selam ketiga. Sementara itu, dalam kerjasama yang tertuang dalam skema *joint development* penelitian ini menemukan terjadinya persebaran teknologi melalui media *transfer* dan *intellectual-exchange* yang dibuktikan dengan adanya *Combine Research & Development Centre* (CRDC). CRDC ini berisikan delegasi dari kedua negara, dengan total delegasi Indonesia sebanyak 37

*engineers* yang berasal dari PT. DI dan TNI AU. Dalam konteks strata di lingkup industri pertahanan global, penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi Indonesia berada di titik antara B dan C, tepatnya di titik *licensed production and assembly; co-development and production of less advanced arms with foreign partners*. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi alutsista yang merupakan hasil kerjasama dengan pihak asing. Selain itu, hal ini menandakan bahwa masih terlampau jauh bagi Indonesia untuk mencapai titik D atau kemandirian dalam industri pertahanan / *autarchy model*. Oleh sebab itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini tengah menerapkan model pengembangan niche, yaitu dengan menjadikan kerjasama dengan pihak lain sebagai cara untuk mengembangkan kapabilitas industri pertahanan nasional.

## 6.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah disajikan sebelumnya, maka penelitian mengenai implementasi kerjasama industri pertahanan Indonesia-Korea Selatan periode 2013-2014 memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari sisi perjanjian, ke depannya sebaiknya pemerintah Indonesia lebih hati-hati dalam menentukan poin-poin dalam sebuah perjanjian. Hal ini penting untuk diperhatikan guna meminimalisir adanya potensi penundaan atau pemberhentian program kerjasama ketika kerjasama belum selesai.

2. Melihat dari implementasi kerjasama industri antara Indonesia dan Korea Selatan pada periode 2013 hingga 2017 yang mengalami penundaan, maka sebaiknya pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama tersebut memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat bisa menjadi pondasi bagi sebuah kerjasama, sehingga, sehingga proyek yang ada tidak mengalami penundaan meskipun terjadi perubahan rezim.

Berdasarkan tujuan dari Indonesia untuk memiliki industri pertahanan nasional yang mandiri, maka pihak Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang yang mendukung peningkatan kapabilitas industri pertahanan nasional. Pemerintah harus menjamin adanya keselarasan antara tiga pihak utama yang terlibat bagi eksistensi industri pertahanan nasional. Komitmen yang kuat pun harus hadir, dimana sejauh ini industri pertahanan Indonesia masih terlampau sulit dalam menemukan pasar guna mengembangkan kapabilitas industri tersebut. Selain itu, komitmen dalam konteks pendanaan juga harus kuat, karena untuk menjadikan industri pertahanan yang mandiri memerlukan biaya yang sangat besar. Terakhir ialah mengenai budaya internal yang harus dirubah, mulai dari keinginan terhadap sesuatu yang instan (hanya membeli) menjadi lebih sabar, dan kondisi internal seperti KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang harus dibersihkan sehingga tidak mempengaruhi berbagai program strategis.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional: Pustaka Pelajar*.
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar.
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional: kerangka untuk analisis*. Erlangga.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.
- Morgenthau, 1997, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace: six edition*, Peking University Press Beijing.
- Randall B. Ripley, Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Universitas Michigan.
- Robert Wilkinson-Latham & Michael Roffe, 1975, *Napoleon's Artillery*, London, Osprey Publishing Limite.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business Edisi I and II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudjianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Surmayadi, Nyoman. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.

Thomas W. Zarzecki, 2002, *Arms Diffusion The Spread of Military Innovations in the International System*, New York, Routledge.

### **JURNAL:**

Armandha. Semmy Tyar., Arwin Datumaya Wahyudi Sumari & Haryo Budi Rahmadi, *Ekonomi Politik Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam Joint Development Pesawat Tempur KF-X / IF-X*, Universitas Pertahanan Indonesia, Global & Strategis, Th.10, No.1.

Berelovich, Eyal, 2014, *Turkish-Israeli Military Relations and Security Cooperation Vol.4*, Istanbul, Turkish Review.

Bitzinger, Richard A. 2003. *Towards a Brave New Arms Industry*. Adelphi Papers. London: Routledge.

Bitzinger, Richard A. 2013. *Revisiting Armements Production in Southeast Asia: New Dreams, Same Challenges*, Contemporary Southeast Asia Vol.35 No.3, Singapore.

Bitzinger, Richard A. 2017. *Asian Arms Industries and Impact on Military Capabilities*, Informa UK Limited, trading as a Taylor & Francis Group.

Hartati Sri, Ade Muhammad, Kartib Bayu dan Muhammad Tasrif, 2014, *Indonesia Defense Industry Model Concept: A Study Framework for Defense Industry Building Vol.2 No.4*, Engineering and Technology Publishing.

Jurgen Brauer, *The Arms Industry in Developing Nations: History and Post-Cold War Assessment*, dipresentasikan dalam *Military Expenditure in Developing and Emerging Nations Conference*, Middlesex University, London, 13-14 Maret 1998.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2011, *Kerjasama Indonesia-Korea Selatan*, dan Taufik Arief, *Kerjasama Pengembangan Proyek Jet Fighter Indonesia-Korsel*, Paper, 1 September 2010. Dirujuk dari sumber Mischa Guzel Madian, Thesis, Universitas Indonesia. Pp.46.

Laksmana, Evan A. 2011. *Indonesia's Rising Regional and Global Profile: Does Size Really Matter?*. Contemporary Southeast Asia Vol.33, No.2, ISEAS.

Mallik, Amitav. 2004. *Technology and Security in the 21<sup>st</sup> Century: A Demand-side Perspective*, SIPRI Report No.20, Oxford University Press.

Mischa Guzel Madian, 2012, *Analisa Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengembangan Pesawat Tempur KAI KF-X / IF-X*, Thesis, Jakarta, FISIP Universitas Indonesia

Prasetyo, Tunggul. Armaidly Armawi. Dafri Agus Salim, 2017, *Evaluasi Kinerja KKIP Dalam Kerjasama Republik Indonesia-Korea Selatan Pada Pembangunan Kapal Selam Untuk Mendukung Ketahanan Alutsista TNI Angkatan Laut*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol.23 No.1.

Tan, Andrew, 2011. “*East Asia’s Military Transformation: The Revolution in Military Affairs and its Problems*”. Jurnal *Security Challenges*, Vol. 7, No. 3 (Spring).

The Defence Industry in the 21<sup>st</sup> Century, pp. 2.

Thomas Ladenburg, *The Industrial Revolution: Chapter 1*. Pp. 1-3. Dapat dilihat di [www.digitalhistory.uh.edu](http://www.digitalhistory.uh.edu)

Tomas Malmlof, 2016, *A Case Study of Russo-Ukrainian Defense Industrial Cooperation: Russian Dilemmas*, vol.29. no.1, Journal of Slavic Military Studies, Routledge.

#### **WEBSITE :**

Basis Data Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, 2017 <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>, diakses pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 02.14 WIB.

Patricia Diah Ayu Saraswati, 2017, *Pengerjaan Kapal Selam Buatan Indonesia Rampung 2018*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814185635-20-234709/pengerjaan-kapal-selam-buatan-indonesia-rampung-tahun-2018/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2017, pukul 02.34 WIB.

Perbandingan Alutsista Negara-negara Asia Tenggara, <https://www.globalfirepower.com/>, diakses pada 22 Februari 2018, pukul 12.34 WIB.

Scott Morrissey, 2006, *U.S. Lift Indonesia Arms Embargo*, [https://www.armscontrol.org/act/2006\\_01-02/JANFEB-Indonesia](https://www.armscontrol.org/act/2006_01-02/JANFEB-Indonesia), diakses pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 01.24 WIB.

SIPRI database, 2012, *EU Arms Embargo on Indonesia*, [https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu\\_arms\\_embargoes/indonesia](https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/indonesia), diakses 15 Desember 2017, pukul 01.55 WIB.

Website Resmi Kedutaan Besar Republik Korea Selatan untuk Republik Indonesia, [http://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m\\_2717/contents.do](http://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2717/contents.do),

<https://www.republika.co.id/berita/senggang/unik/16/09/19/odq2vg328-sejarah-unik-terciptanya-kapal-selam-pertama-dunia>

<https://www.jejaktapak.com/2017/03/03/tank-pertama-di-dunia-berawal-dari-traktor-amerika/>, pada 8 Oktober 2018, pukul 01.15 WIB.

<http://www.grid.id/read/04198653/bukan-rusia-dan-amerika-negara-inilah-penemu-pesawat-jet-pertama-kali-di-dunia?page=all>, pada 8 Oktober 2018, pukul 01.16 WIB.

Empat teknologi Eropa dalam KF-X / IF-X, diakses dari sumber: <https://nasional.tempo.co/read/895226/jet-tempur-kfxifx-mengadopsi-4-teknologi-eropa/full&view=ok>, diakses pada tanggal 24 November 2018, pukul 23.10 WIB.

Penyerahan kapal selam kedua, diakses dari sumber: <https://kumparan.com/@kumparannews/kapal-selam-baru-kri-ardadedali-404-siap-perkuat-tni-al>, pada tanggal 23 November 2018, pukul 20.18 WIB.

Diakses dari sumber: <http://www.tribunnews.com/internasional/2016/10/24/ini-penampakan-kapal-selam-canggih-yang-dipesan-tni-al-dari-korsel>, pada tanggal 23 November 2018, pukul 00.23 WIB.

Diakses dari sumber: <https://jakartagreater.com/changbogo-siluman-penjaga-nusantara/>, pada tanggal 22 November 2018, pukul 22.56 WIB.

Statement Menhan RI mengenai adanya penundaan program KF-X / IF-X, diakses dari sumber: <https://jakartagreater.com/program-pesawat-tempur-kfx-ifx-terus-berlanjut/>, pada tanggal 16 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.

Kemhan klaim proyek KF-X / IF-X sudah mencapai 14%, Diakses dari sumber: <https://nasional.tempo.co/read/895332/alutsista-tni-jet-tempur-buatan-korsel-indonesia-capai-14-persen/full&view=ok>, pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 23.16 WIB.

Diakses dari sumber: <http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/kemhan-klarifikasi-proyek-kfx/31777>, pada tanggal 16 November 2018, pukul 09.37 WIB.

Diakses dari: <https://www.zonareferensi.com/daftar-presiden-korea-selatan/>, pada 3 November 2018, pukul 22.06 WIB.

Pelaksanaan *wind tunnel test*, diakses dari sumber: <https://jakartagreater.com/desain-rinci-jet-tempur-kfxifx-dimulai-2018/>, pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 06.02 WIB.

Diakses dari sumber: <https://jakartagreater.com/tahap-pesawat-kfx-62-engineer-ri-ke-korea-selatan/>, pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 22.08 WIB.

Diakses dari sumber: <https://nasional.tempo.co/read/895332/alutsista-tni-jet-tempur-buatan-korsel-indonesia-capai-14-persen/full&view=ok>, pada tanggal 2 Desember 2018, pukul 23.16 WIB.

Diakses dari sumber: <http://www.beritasatu.com/nasional/215572-proyek-pesawat-tempur-canggih-kfx-dipastikan-berlanjut.html>, pada tanggal 16 November 2018, pukul 09.52 WIB.

Berita mengenai dilanjutkannya proyek jet tempur pada 2014. Diakses dari sumber: <https://finance.detik.com/industri/d-2587848/jet-tempur-made-in-indonesia-diproduksi-massal-mulai-2022>, pada tanggal 21 November 2018, pukul 20.43 WIB.

Diakses dari sumber: <https://jakartagreater.com/road-map-program-pesawat-kfxifx/>, pada tanggal 4 November 2018, pukul 20.11 WIB.

<https://jakartagreater.com/road-map-program-pesawat-kfxifx/>, diakses pada tanggal 2 November 2018, puku 01.14 WIB.

<https://news.detik.com/berita/2742440/ini-spesifikasi-pesawat-ifxkfx-hasil-kerjasama-indonesia-dan-korsel>.



Penjelasan mengenai Priliminary Design Review (PDR) dan Critical Design Review (CDR), lihat pada: <http://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/critical-design-review>, diakses pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 21.37 WIB.

[www.defenseworld.net/news/11485/Indonesia\\_\\_South\\_Korea\\_Sign\\_Second\\_Phase\\_Of\\_KFX\\_IFX\\_Fighter\\_Development\\_Agreement#.XAI18dszbIV](http://www.defenseworld.net/news/11485/Indonesia__South_Korea_Sign_Second_Phase_Of_KFX_IFX_Fighter_Development_Agreement#.XAI18dszbIV), pada tanggal 6 November 2018, pukul 22.18 WIB.

Penjelasan mengenai Priliminary Design Review (PDR) dan Critical Design Review (CDR), lihat pada: <http://acqnotes.com/acqnote/acquisitions/critical-design-review>, diakses pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 21.37 WIB.

#### **LAPORAN PENELITIAN:**

Andi Widjajanto & Makmur Keliat, 2005, *Laporan Penelitian: Penggunaan Fasilitas Kredit Ekspor untuk Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Indonesia (2000-2004)*, Jakarta, Pacivis-FISIP UI.

#### **WAWANCARA:**

Letnan Kolonel (Tek) Nanang F. Alamie, Kepala Seksi Perizinan Ekspor Impor, Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jakarta, 15 Agustus 2018. (Terlampir)